

# ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2019



# ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2019



75 %



37.91%

LINE ITEMS	16.15 MS
SHIPPING	0.15 MS
TAXES	0%
TOTAL	16.3 MS



**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)  
DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2015 - 2019**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

Copyright ©2021 by Lentera Q  
Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**“ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)  
DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2015 - 2019”**

**ISBN : 978-602-6737-29-8**

xii+62 hal., 18 x 25 cm

Cetakan pertama : Januari 2021

Rancang Sampul : Akhmad Tohir

Tata Letak : Akhmad Tohir

Penerbit : Lentera\_Q

Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamanwinangun RT.001, RW.009 Kebumen  
54313 Jawa Tengah, Telp/Fax : 0287 3873103,(WA) 0821-4974-  
3807.

Anggota IKAPI : 172/JTE/2019

Email : qlentera@yahoo.co.id

Website : www.qlentera.co.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau mem perbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)  
DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Pengarah : Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM,  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah
- Dra. Siti Wahyuni, MM, Sekretaris Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Penanggungjawab : Dra. Dewi Indrajati, MM,  
Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pemberdayaan  
Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah.
- Editor : Dr. Indra Kertati, M.Si
- Ketua Tim Penulis : Dr. Indra Kertati, M.Si
- Anggota Tim : Fajar Hanung Basworo, ST  
Melati Dyah Pamungkas, SE, MM
- Pengolah Data : Ragil Wilantuko, SE  
Haris Muzzaky, SE
- Desain Buku : Tities Kartikasari Handayani, ST

## **SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah, penyusunan buku Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah telah selesai disusun. Buku ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah serta capaian Kabupaten/Kota. Memperhatikan perkembangan IPG dan IDG akan memberikan motivasi dan kekuatan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, mengingat indikator IPG dan IDG menggambarkan status dan kondisi ketimpangan gender yang ada.

Menurunnya IPG dan IDG disebabkan banyak hal diantaranya factor budaya yang masih membelenggu kehidupan perempuan sehingga aksesibilitas perempuan menggapai sumberdaya yang ada tidak dapat berkembang. Faktor budaya di masyarakat memang tidak mudah dilangkan begitu saja, hal ini terkait dengan konstruksi yang telah terbentuk bertahun-tahun. Perspektif gender dalam masyarakat masih dianggap sebagai perspektif stereotipe, dan gender masih dianggap sebagai kepentingan perempuan.

Tantangan lain adalah belum optimalnya peran-peran actor kunci baik di lingkungan pemerintahan, dan stakeholder dalam mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mendorong, mempercepat pencapaian IPG dan IDG melalui berbagai program dan kegiatan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melakukan sendiri. Dukungan masyarakat menjadi salah satu yang penting untuk mewujudkan impian ini semua.

Menghadapi pandemik Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari akan terjadi penurunan capaian IPG dan IDG. Upaya memutus rantai penyebaran, melakukan intervensi ekonomi masyarakat, dan mendorong agar keluarga, tetap aman, dan kondisi ekonomi rumah tangga pulih sudah banyak dilakukan, namun covid-19 memang bukan pandemi biasa. Covid-19 benar-benar merupakan penyakit menular yang dasyat dan penyebarannya bisa dari banyak arah.

Sementara itu berbagai kajian, laporan penularan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memutus rantai penularan masih rendah. Kluster-kluster baru bermunculan, mulai dari kluster kerumunan merambah ke kluster keluarga. Anak-anak yang berada di rumah juga mengalami berbagai tekanan akibat penyakit ini, bahkan kekerasan dalam keluargapun tak dapat dihindari.

Berbagai upaya dari berbagai penjuru tidak berhenti, dan korban berjatuhan setiap hari. Kondisi inilah yang disadari akan berpengaruh terhadap komposit pembentuk IPG dan IDG Jawa Tengah.



Apapun pengaruhnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap optimis, covid-19 akan berakhir. IPG serta IDG akan segera meningkat, walaupun tipis, namun pasti.

Saya mengapresiasi kerja tim penulis yang dalam waktu singkat menggali data dari berbagai sumber baik langsung maupun sekunder. Kerja keras ini telah menghasilkan karya nyata yang berguna bagi Jawa Tengah. Terima kasih saya sampaikan kepada tim penulis atas semua yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal ini. Terima kasih kepada Perangkat Daerah yang telah bersedia membahas dan mendiskusikan hasil-hasil kerja tim hingga dapat disempurnakan.

Semoga hasil analisis atas IPG dan IDG ini dapat berguna baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Semoga Allah senantiasa menguatkan, menjaga dan melindungi pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi pandemi covid-19.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2020,

Kepala Dinas,

Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM

## KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur kondisi pembangunan manusia laki-laki dan perempuan (IPG) dan kondisi keberdayaan perempuan (IDG). Pencapaian atas indikator IPG dan IDG tidak dapat dilakukan oleh pemangku urusan yang biasanya dibebankan kepada pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

IPG dan IDG adalah indeks yang terbentuk dari beberapa indikator sehingga pencapaiannya merupakan *mainstreaming* yang harusnya menjadi beban banyak pengampu urusan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Terdapat tiga dimensi dalam mengukur IPG yaitu dimensi umur panjang dan sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir (e0) baik laki-laki dan perempuan; dimensi pengetahuan dengan ukuran Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan; serta kehidupan yang layak yang diukur dari perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri atas tiga indikator pembentuk, yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Memperhatikan uraian IPG dan IDG, maka sesungguhnya pencapaian IPG dan IDG menjadi tanggung jawab daerah khususnya pengampu urusan yang relevan.

Pencapaian IPG Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 mengalami penurunan meskipun lebih tinggi dari angka nasional. Angka capaian untuk indikator AHH lebih tinggi dibandingkan nasional, namun untuk indikator HLS dan RLS masih berada dibawah nasional. Kondisi rata-rata pendapatan perkapita, untuk laki-laki masih dibawah nasional, namun kondisi perempuan lebih tinggi dibandingkan nasional.

Pencapaian IDG Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan nasional, namun posisi tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Indikator yang berada lebih rendah dari nasional adalah perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan.

Pencapaian IPG dan IDG menjadi pekerjaan bagi Provinsi Jawa Tengah dengan upaya akselerasi pada program dan kegiatan untuk lima tahun ayang akan datang. Para pengampu urusan harus selektif memilih sub kegiatan yang menjawab persoalan yang dihadapi. Tumpuan harapan tidak bisa lagi diletakan pada pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun harus dipetakan untuk saling menguatkan dalam pencapaian indikator maupun sub indikator pembentuk IPG dan IDG.

Persoalan akan muncul karena pandemic covid-19 yang berlangsung telah mengubah tatanan kehidupan termasuk diantaranya refocus anggaran, yang menyebabkan perubahan terhadap tata kelola. Covid-19 merubah segalanya. Dengan kondisi pandemic covid-19 yang sulit untuk diprediksi, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian IPG dan IDG.

Buku ini tersusun dengan melibatkan banyak pihak, baik Perangkat Daerah, Stakeholder, LSM, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Kemasyarakatan. Tidak berlebihan jika kami menyampaikan terima kasih yang setulusnya atas semua masukan, kritik dan tanggapan sehingga tersusun buku ini.

Terima kasih secara khusus kepada tim pendukung, penyedia data, dan contributor lainnya yang telah berupaya mewujudkan kebutuhan untuk analisis IPG dan IDG ini. Sungguh apa yang telah diberikan oleh tim mendukung telah banyak memberi arti bagi tersusunnya buku ini.

Akhirnya kami berharap buku Analisis IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang ada baik untuk provinsi Jawa Tengah maupun untuk kabupaten kota di Jawa Tengah. Buku ini diharapkan melengkapi referensi yang ada tentang IPG dan IDG.

Semarang, Desember 2020

Ketua Tim Penyusun,

Dr. Indra Kertati, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Maksud dan Tujuan</b> .....	5
<b>C. Landasan Hukum</b> .....	5
<b>BAB II KONDISI UMUM JATENG</b> .....	7
<b>A. Kondisi Geografis</b> .....	7
<b>B. Kondisi Demografi</b> .....	10
<b>C. Kondisi Kemiskinan</b> .....	14
<b>BAB III ANALISIS IPG DAN IDG</b> .....	29
<b>A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b> .....	29
<b>B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b> .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	58
<b>A. Kesimpulan</b> .....	58
<b>B. Rekomendasi</b> .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah .....	9
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	11
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	12
Tabel 2.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 .....	14
Tabel 2.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2018 – 2019 .....	15
Tabel 2.6	Persentase Kemiskinan Tahun 2019 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2018-2019 Di Wilayah Setara .....	16
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2019 Di Wilayah Setara .....	18
Tabel 2.8	Komoditi Makanan dan Bukan Makanan Yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2019 (September) .....	22
Tabel 2.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 dan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2019 Di Wilayah Setara .....	24
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 .....	28
Tabel 2.11	Analisis Capaian IPM Perempuan dan Laki-laki Jawa Tengah Tahun 2018-2019 .....	37
Tabel 2.12	Analisis Capaian Pembentuk Perempuan dan Laki-laki Jawa Tengah Tahun 2018-2019 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....	7
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) dan Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 .....	13
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 (%) .....	14
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015 – 2019 (%) .....	15
Gambar 2.5	Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Dengan Provinsi Lain dan Nasional .....	17
Gambar 2.6	Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2019 Dengan Provinsi Lain dan Nasional .....	18
Gambar 2.7	Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2019 Dengan Provinsi Lain dan Nasional .....	19
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret) .....	20
Gambar 2.9	Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 (%) .....	20
Gambar 2.10	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 .....	21
Gambar 2.11	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret) .....	22
Gambar 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 .....	23
Gambar 2.13	Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 dan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2019 Dengan Provinsi Lain dan Nasional .....	24
Gambar 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret) .....	25
Gambar 2.15	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 .....	26
Gambar 2.16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, Dan Nasional Tahun 2019 (Maret) .....	26
Gambar 2.17	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Yang Tersambung Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 .....	27

Gambar 2.18	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2019 (Unit).....	27
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	29
Gambar 3.2	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019 .....	30
Gambar 3.3	Perkembangan Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	30
Gambar 3.4	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019 .....	31
Gambar 3.5	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	32
Gambar 3.6	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019 .....	33
Gambar 3.7	Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	34
Gambar 3.8	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019 .....	35
Gambar 3.9	Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	36
Gambar 3.10	Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	37
Gambar 3.11	Proyeksi IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....	39
Gambar 3.12	Proyeksi AHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....	40
Gambar 3.13	Proyeksi RLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....	41
Gambar 3.14	Proyeksi HLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....	42
Gambar 3.15	Proyeksi Kontribusi Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....	43
Gambar 3.16	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	44
Gambar 3.17	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 .....	45
Gambar 3.18	Perkembangan Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	45
Gambar 3.19	Posisi Relatif Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	49
Gambar 3.20	Perkembangan Indikator Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	50

Gambar 3.21	Posisi Relatif Indikator Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	51
Gambar 3.22	Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 .....	52
Gambar 3.23	Posisi Relatif Indikator Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 .....	53
Gambar 3.24	Proyeksi IDG .....	55
Gambar 3.25	Proyeksi Keterlibatan Perempuan di Parlemen .....	56
Gambar 3.26	Proyeksi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi .....	56
Gambar 3.27	Proyeksi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja .....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. RPJMN Tahun 2020-2024 telah meletakkan perspektif gender sebagai arus utama yang harus dioptimalkan dan mengantarai berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun pemerintah daerah.

Secara nasional kesenjangan gender yang berkembang masih cukup tajam. RPJMN 20-2024 mencatat berbagai isu gender yang masing dirasakan seperti kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi. Rata-rata lama sekolah anak perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, yaitu 7,65 tahun dan 8,56 tahun (Susenas, 2017). Perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 25,62 persen dan 24,04 persen. Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak; (2) Status kesehatan perempuan masih rendah.

Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yaitu 305/100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Saat ini, penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga (IRT) meningkat. Jumlah penderita AIDS tertinggi adalah IRT, mencapai 16.405 orang (Kementerian Kesehatan, 2018). Di bidang ketenagakerjaan, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah. TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 51,88 persen (Sakernas, Agustus 2018). Rata-rata upah buruh perempuan per bulan sebesar 2,4 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki sebesar 3,06 juta rupiah (Sakernas, 2018). Sektor kerja formal juga didominasi oleh tenaga kerja laki-laki yaitu mencapai 45,66 persen, sementara perempuan 38,63 persen.

Dalam hal perlindungan, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Kasus perdagangan perempuan masih tinggi dan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya masih terus berlangsung. Selain itu, kekerasan terhadap anak perempuan meningkat. Kasus kekerasan yang terjadi masih dilatarbelakangi oleh budaya, diantaranya perkawinan anak. Sebanyak 22,91 persen perempuan usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2017).

Keterwakilan perempuan di bidang politik masih rendah. Di lembaga legislatif, 295 keterwakilan perempuan di DPR hanya 17,32 persen (tahun 2014),

sementara keterwakilan perempuan di DPD menurun dari 28 persen (tahun 2009) menjadi 25,75 persen (tahun 2014). Di lembaga eksekutif, proporsi perempuan yang menduduki jabatan struktural Eselon I-V hanya 31,96 persen dibandingkan laki-laki 68,03 persen (BKN, 2017).. Di bidang ekonomi, perempuan yang mengakses kredit masih rendah. Persentase kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit sebesar 1,48 persen dibandingkan laki-laki sebesar 2,38 persen (Susenas, 2015).

Di bidang hukum, beberapa kebijakan dan regulasi masih diskriminatif. Sebanyak 421 kebijakan dan regulasi diskriminatif dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara tahun 2009-2016. Selain itu, pengetahuan aparat penegak hukum dan para calon aparat hukum terkait isu gender dan pentingnya kesetaraan gender masih kurang. Hukum perdata terkait isu gender saat ini juga masih minim perhatian.

Di bidang infrastruktur, hunian dan sanitasi yang tidak layak menghambat perempuan dalam melakukan aktivitas. Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air minum layak masing-masing masih 32,11 persen dan 27,96 persen (Susenas, 2017). Kelangkaan air bersih menyebabkan perempuan sulit mengelola rumah tangga dan melakukan kegiatan produktif dan ekonomis. Hunian sempit dan infrastruktur sanitasi yang berlokasi jauh dan gelap menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dalam hal akses terhadap sumber daya alam, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah. Pembukaan lahan tanpa melibatkan perempuan adat menyebabkan terampasnya hak perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam.

Kelembagaan dan pelembagaan PUG belum kuat. Meskipun PUG telah menjadi strategi nasional, tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh K/L dan pemerintah daerah. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah masih harus diperkuat.

Oleh karena itulah RPJMN 2020-2024 mengamanahkan bahwa pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, melalui: 1. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup: a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; b) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; c) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; d) Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG; e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan f) Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan; 2. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup: a) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan b) Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan perempuan

mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan.

Untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tersebut diatas, secara khusus Presiden menugaskan KPPPA untuk menyelesaikan isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; (2) peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; (3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) penurunan pekerja anak dan (5) pencegahan perkawinan anak.

Dalam RPJMN 2020-2024 menempatkan strategi pembangunan nasional dengan memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dengan indikator : (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini sesuai dengan berbagai kesepakatan global bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia adalah pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan penduduk dilihat dari perspektif gender. Indikator ini juga menilai tentang kapasitas perempuan dalam mencapai kesejahteraan baik terpenuhinya kebutuhan praktis maupun strategis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran perempuan dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik. IPG diformulasikan sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Jika angka yang dicapai dalam perhitungan ini mencapai 100 artinya kesenjangan menyecil, demikian sebaliknya. IDG berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dengan memperhatikan kinerja perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan capaian IPG dan IDG diatas rata-rata capaian Nasional. Tahun 2019 capaian IPG Nasional sebesar 90,99, sedangkan Jawa Tengah 91,95. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya dan menempati ranking 11 di tingkat nasional. Capaian IDG Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 74,03 menempati ranking 5 di atas rata-rata nasional yang mencapai 72,10. Posisi Jawa Tengah berada dibawah Provinsi Sulawesi Utara (80,91), Provinsi Maluku (77,77), Provinsi Riau (75,73) dan Provinsi Sumatera Selatan (74,37).

Posisi Jawa Tengah ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia sekaligus pemberdayaan perempuan. Pencapaian IPG dan IDG cenderung menurun. Kontribusi atas penurunan ini disumbangkan oleh dimensi ekonomi yaitu rata-rata pendapatan perempuan.

Kehadiran pandemic COVID-19 ini mengkhawatirkan banyak pihak atas pencapaian IPG dan IDG. Jawa Tengah termasuk dalam 5 besar provinsi dalam kategori zona merah. Dalam perkembangannya hingga JULI 2020, Satuan Tugas Nasional Percepatan Penanganan Virus Corona Covid-19 melaporkan masih ada tiga wilayah di Jawa Tengah yang masuk zona berisiko tinggi penyebaran virus corona yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan, data pasien positif terkonfirmasi virus corona di Jawa Tengah hingga 22 Juli 2020 mencapai 7.593 kasus. Jumlah pasien positif terkonfirmasi virus corona di Jawa Tengah tersebut sebanyak 3.777 orang dinyatakan sembuh atau dengan persentase sebesar 49,74% dari total pasien positif. Jumlah pasien yang positif virus corona di Jawa Tengah yang masih menjalani perawatan sebanyak 3.180 orang atau sebanyak 41,88% dari total pasien positif corona di Provinsi Jawa Tengah. Pasien positif corona yang meninggal dunia sebanyak 636 orang atau sebesar 8,38% dari total kasus positif corona. Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus corona di Jawa Tengah hingga 22 Juli 2020 sebanyak 10.974 orang, sebanyak 1.308 masih

menjalani perawatan, atau 11,92%, sedangkan PDP yang meninggal dunia sebanyak 1.501 orang atau dengan persentase 13,68%.

Kasus terbesar penyebaran virus corona berada di Kota Semarang dengan jumlah kasus sebanyak 868 orang masih menjalani perawatan. Akumulasi pasien positif corona di Kota Semarang yang sudah sembuh mencapai 1.299 orang dan meninggal dunia sebanyak 268 orang.

Kasus pasien positif corona di Kabupaten Jepara yang menjalani perawatan sebanyak 498 orang dengan kondisi sembuh sebanyak 313 orang dan meninggal dunia dilaporkan sebanyak 53 orang. Posisi zona merah ketiga adalah Kabupaten Demak dengan jumlah pasien dirawat sebanyak 413 orang, sembuh sebanyak 245 orang, sementara yang meninggal dunia sebanyak 131 orang.

Posisi keempat adalah Kabupaten Kudus dengan jumlah kasus pasien positif corona dirawat sebanyak 209 orang, dengan kondisi sembuh 211 orang dan 52 orang meninggal dunia. Wilayah kelima dengan kasus corona di Jawa Tengah yang terbesar adalah Kabupaten Semarang dengan jumlah pasien virus corona yang menjalani perawatan sebanyak 133 orang, yang telah sembuh sebanyak 33 orang dan sebanyak 20 orang meninggal dunia.

**“Kondisi COVID-19 telah memicu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemutusan penyebaran virus corona sekaligus menguatkan keberdayaan masyarakat. Komponen penting yang secara khusus akan berpengaruh adalah kondisi perekonomian masyarakat.”**

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskertans) Jateng, sampai 29 April 2020, jumlah buruh terkena PHK sebanyak 13.163 orang dan dirumahkan sebanyak 37.400 orang. Kota Semarang paling banyak terjadi PHK buruh, yakni 2.385 orang, disusul Kabupaten Boyolali sebanyak 1.950 orang, Kabupaten Sragen sebanyak 1.451 orang, Kabupaten Demak sebanyak 1.255 orang, dan Kabupaten Grobogan sebanyak 1.001 orang. Buruh di Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Purworejo, Pemalang, Rembang, dan Temanggung hanya dirumahkan saja, yakni Blora (472 orang), Kudus (132 orang), Purworejo (1.269 orang), Pemalang (1.263 orang), Temanggung (974 orang).

Lembaga Moneter Internasional (IMF) memperingatkan jika dampak pandemi Covid-19 paling menyakitkan kaum perempuan dibandingkan laki-laki dan bisa berlanjut hingga bertahun-tahun. Menurut Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva pandemi Covid-19 mengancam peluang ekonomi bagi perempuan, memperluas kesenjangan gender. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2008, yang oleh sebagian orang dijuluki man-cession. Kehilangan pekerjaan akibat pandemi kali ini paling akut menimpa bidang-bidang di mana perempuan berkecimpung secara tidak proporsional, terutama mereka yang banyak mengandalkan pekerjaan yang membutuhkan interaksi tatap muka seperti ritel, pariwisata, dan layanan lainnya. Dampak terhadap perempuan juga lebih terasa di rumah yaitu bertambahnya beban yang cenderung mengambil tanggung jawab tambahan, seperti mengawasi anak akibat penutupan sekolah dan layanan penitipan anak.

Memperhatikan hal ini, diperlukan kajian perkembangan IPG dan IDG untuk lima tahun yang akan datang mengingat perubahan yang terjadi akibat dampak covid 19 yang secara nyata telah mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat khususnya perempuan. Kondisi ini secara khusus akan memperhatikan variabel bergerak yaitu dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kajian ini adalah untuk memprediksi capaian IPD dan IDG Jawa Tengah. Sedangkan tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis perkembangan capaian IPD dan IDG lima tahun yang lalu sebagai landasan dalam merumuskan strategi percepatan pencapaian IPG dan IDG yang ideal.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang nomo2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

# BAB II KONDISI UMUM JATENG

## A. Kondisi Geografis

Kondisi geografi provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, dan berada di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04 persen dari luas Pulau Jawa atau 1,70 persen dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Panjang garis pantai Jawa Tengah sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km

dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Kondisi ini menggambarkan Jawa Tengah berada di wilayah pantai baik pintura maupun pantai selatan, daerah pegunungan, dan dataran rendah.

Provinsi Jawa Tengah berada di dua jalur titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta-Surabaya), dan pusat pariwisata potensial di DI Yogyakarta. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, meliputi 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

**Gambar 2.1** Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Dalam perspektif topografi, kondisi Provinsi Jawa Tengah sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah<sup>1</sup>.

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemasang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal).

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, sertagromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite, Batuapung, Trass, Diatome, Marmer, Batu gamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, Toseki), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Memperhatikan kondisi topografi tersebut, Jawa Tengah termasuk Provinsi rawan bencana yang mendapat perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. BPBD Jawa Tengah mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2019, terdapat 2.179 bencana alam. Bencana itu mengakibatkan sebanyak 35 korban meninggal dan kerugian hingga miliaran rupiah. Bencana terbesar adalah kebakaran dengan total 645 kejadian, disusul angin puting beliung sebanyak 572 kejadian, tanah longsor sebanyak 504 kejadian, dan kebakaran hutan lahan sebanyak 294 kejadian, serta banjir sebanyak 151 kejadian.

Berbagai bencana alam tersebut membuat 1.200 rumah penduduk mengalami rusak berat, 1.832 rumah rusak sedang, dan 8.670 rumah mengalami rusak ringan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.691 desa yang rawan bencana banjir, 2.136 desa rawan bencana longsor, dan 658 desa rawan bencana angin puting beliung. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah

---

<sup>1</sup> RKPD Jawa Tengah 2020

melakukan berbagai upaya pencegahan seperti fasilitasi Desa Tangguh Bencana (Destana), pemasangan Early Warning System (EWS), serta simulasi dan pelatihan bagi masyarakat.

Semu Kabupaten Kota di Jawa Tengah adalah rawan bencana. Tertinggi adalah bencana tanah puting beliung yang dialami oleh seluruh kabupaten kota kecuali Kota Tegal. Rawan banjir terjadi di 30 Kabupaten Kota, hanya ada lima kabupaten kota yang tidak rawan banjir yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Wonogiri, Sukoharjo dan Karanganyar. Bencana banjir bandang terjadi di 19 kabupaten kota, tanah longsor terjadi di 31 kabupaten kota, letusan gunung berapi 6 kabupaten kota dan gempa bumi terjadi di tiga kabupaten yaitu Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen.

**Tabel 2.1.**  
**Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah**

<b>No</b>	<b>Kewenangan</b>	<b>Wilayah Sungai</b>	<b>Luas DAS (km<sup>2</sup>)</b>
<b>1</b>	<b>Pusat</b>	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
		Jratun Seluna	9.576,01
		Bengawan Solo	19.778,00
		Progo Opak Serang	3.238,89
		Serayu Bogowonto	7.344,61
		Citanduy	4.450,44
<b>2</b>	<b>Provinsi</b>	Pemali Comal	4.425,36
		Bodri Kuto	1.647,40
<b>3</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	Wisio Gelis	654,27
		Kep. Karimun Jawa	71,20

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

Selanjutnya dari kondisi hidrologi, Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak, dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas, yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah, antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh)

Wilayah Sungai (WS) yang kewenangannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km<sup>2</sup>) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km<sup>2</sup>). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten/kota.

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2019 berkisar 18,10C sampai dengan 28,70C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 74 persen sampai dengan 89 persen. Tahun 2019 tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 231 mm<sup>3</sup> dan curah hujan terendah di bulan Juni dan Juli sebesar 1 mm<sup>3</sup>. Hari hujan terbanyak juga terjadi di bulan Januari sebanyak 21 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Juni-Agustus sebanyak 1 hari hujan.

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 masih didominasi oleh hutan seluas 873,191,98 hektar atau 25,42 persen dari luas Jawa Tengah. Penggunaan berikutnya adalah sawah tadah hujan seluas 775.493,5 hektar (22,57 persen), permukiman seluas 642.258,47 hektar (18,69 persen), dan kebun seluas 420.462,51 hektar (12,23 persen).

## B. Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi penduduk BPS bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak 34.718.204 jiwa, tahun 2020 diproyeksikan sebanyak 34.940.078 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen atau sebanyak 0,23 juta jiwa dari 2018 ke tahun 2019. Jumlah ini meningkat sebesar 0,63 persen atau sebanyak 0,22 juta jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.212,46 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 17.505,75 ribu jiwa, dengan Rasio Jenis Kelamin sebesar 98,32. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah per tahun selama kurun waktu 2010-2019 sebesar 0,78.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Semarang yaitu sebanyak 1.814.110 jiwa atau 5,23 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kota Magelang yaitu sebanyak 122.111 jiwa atau 0,35 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat kepadatannya, maka Kota Surakarta merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebanyak 11.293 jiwa perkm<sup>2</sup>. Sementara itu wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 479 jiwa per km<sup>2</sup>. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk di Jawa Tengah ini diketahui bahwa wilayah kota memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

No	Kab/Kota	Data Admindukcapil					Data BPS				
		Laki-Laki	Wanita	Jumlah	%	RJK	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	%	RJK
1	Cilacap	934.014	908.899	1.842.913	5,15	102,76	865.031	862.067	1.727.098	4,97	100,34
2	Banyumas	881.645	861.683	1.743.328	4,87	102,32	845.612	847.394	1.693.006	4,88	99,79
3	Purbalingga	484.655	471.210	955.865	2,67	102,85	461.281	472.708	933.989	2,69	97,58
4	Banjarnegara	512.082	491.902	1.003.984	2,80	104,10	462.405	460.787	923.192	2,66	100,35
5	Kebumen	696.103	668.802	1.364.905	3,81	104,08	596.388	601.594	1.197.982	3,45	99,13
6	Purworejo	388.439	385.678	774.117	2,16	100,72	354.084	364.232	718.316	2,07	97,21
7	Wonosobo	442.177	419.410	861.587	2,41	105,43	400.612	389.892	790.504	2,28	102,75
8	Magelang	648.458	634.947	1.283.405	3,58	102,13	647.413	643.178	1.290.591	3,72	100,66
9	Boyolali	498.709	495.218	993.927	2,78	100,70	484.716	500.091	984.807	2,84	96,93
10	Klaten	650.315	652.341	1.302.656	3,64	99,69	576.513	598.473	1.174.986	3,38	96,33
11	Sukoharjo	452.324	447.226	899.550	2,51	101,14	441.782	450.130	891.912	2,57	98,15
12	Wonogiri	537.015	536.290	1.073.305	3,00	100,14	466.206	493.286	959.492	2,76	94,51
13	Karanganyar	450.558	450.518	901.076	2,52	100,01	438.296	448.223	886.519	2,55	97,79
14	Sragen	492.982	490.493	983.475	2,75	100,51	436.180	454.338	890.518	2,56	96,00
15	Grobogan	729.738	720.053	1.449.791	4,05	101,35	681.296	696.492	1.377.788	3,97	97,82
16	Blora	448.172	447.753	895.925	2,50	100,09	425.590	439.423	865.013	2,49	96,85
17	Rembang	317.384	311.195	628.579	1,76	101,99	317.910	320.278	638.188	1,84	99,26
18	Pati	641.266	645.142	1.286.408	3,59	99,40	609.984	649.606	1.259.590	3,63	93,90
19	Kudus	415.830	419.488	835.318	2,33	99,13	428.815	442.496	871.311	2,51	96,91
20	Jepara	586.376	576.153	1.162.529	3,25	101,77	627.007	630.905	1.257.912	3,62	99,38
21	Demak	566.115	552.491	1.118.606	3,12	102,47	575.895	586.910	1.162.805	3,35	98,12
22	Semarang	506.754	504.881	1.011.635	2,82	100,37	517.597	536.189	1.053.786	3,04	96,53
23	Temanggung	385.107	383.232	768.339	2,15	100,49	386.782	385.236	772.018	2,22	100,40
24	Kendal	497.557	475.735	973.292	2,72	104,59	492.113	478.973	971.086	2,80	102,74
25	Batang	392.441	382.879	775.320	2,16	102,50	383.697	384.886	768.583	2,21	99,69
26	Pekalongan	476.342	460.628	936.970	2,62	103,41	445.790	451.921	897.711	2,59	98,64
27	Pemalang	751.454	723.142	1.474.596	4,12	103,92	644.682	658.131	1.302.813	3,75	97,96
28	Tegal	756.207	724.660	1.480.867	4,14	104,35	715.887	724.811	1.440.698	4,15	98,77
29	Brebes	969.913	929.025	1.898.938	5,30	104,40	908.786	900.310	1.809.096	5,21	100,94
30	Kota Magelang	63.853	65.883	129.736	0,36	96,92	60.107	62.004	122.111	0,35	96,94
31	Kota Surakarta	276.980	285.821	562.801	1,57	96,91	252.594	266.993	519.587	1,50	94,61
32	Kota Salatiga	95.381	96.697	192.078	0,54	98,64	94.887	99.197	194.084	0,56	95,66
33	Kota Semarang	823.173	835.379	1.658.552	4,63	98,54	889.298	924.812	1.814.110	5,23	96,16
34	Kota Pekalongan	154.859	151.208	306.067	0,85	102,41	153.518	153.579	307.097	0,88	99,96
35	Kota Tegal	141.625	140.184	281.809	0,79	101,03	123.701	126.204	249.905	0,72	98,02
	<b>Jumlah</b>	<b>18.066.003</b>	<b>17.746.246</b>	<b>35.812.249</b>	<b>100,00</b>	<b>101,80</b>	<b>17.212.455</b>	<b>17.505.749</b>	<b>34.718.204</b>	<b>100,00</b>	<b>98,32</b>

Keterangan: RJK adalah Rasio Jenis Kelamin

Sumber: Dinperdadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019**

<b>Kelompok</b>	<b>Data BPS</b>			
	<b>Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	1.347.755	1.278.897	2.626.652	7,57
5-9	1.410.146	1.332.857	2.743.003	7,90
10-14	1.426.638	1.354.712	2.781.350	8,01
15-19	1.423.617	1.353.136	2.776.753	8,00
20-24	1.413.120	1.337.940	2.751.060	7,92
25-29	1.266.426	1.239.465	2.505.891	7,22
30-34	1.146.481	1.183.646	2.330.127	6,71
35-39	1.170.649	1.247.463	2.418.112	6,96
40-44	1.194.579	1.250.732	2.445.311	7,04
45-49	1.156.235	1.219.145	2.375.380	6,84
50-54	1.091.603	1.174.036	2.265.639	6,53
55-59	974.369	1.045.324	2.019.693	5,82
60-64	800.196	827.948	1.628.144	4,69
65-69	570.236	590.552	1.160.788	3,34
70-74	364.704	437.566	802.270	2,31
>=75	455.701	632.330	1.088.031	3,13
<b>Jumlah</b>	<b>17.212.455</b>	<b>17.505.749</b>	<b>34.718.204</b>	<b>100,00</b>

<b>Kelompok</b>	<b>Data Adminkapil</b>			
	<b>Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	1.167.498	1.093.706	2.261.204	6,31
5-9	1.450.729	1.357.581	2.808.310	7,84
10-14	1.403.118	1.318.570	2.721.688	7,60
15-19	1.455.508	1.383.219	2.838.727	7,93
20-24	1.509.431	1.426.648	2.936.079	8,20
25-29	1.458.608	1.379.498	2.838.106	7,92
30-34	1.452.635	1.397.416	2.850.051	7,96
35-39	1.492.178	1.459.862	2.952.040	8,24
40-44	1.303.155	1.315.435	2.618.590	7,31
45-49	1.259.622	1.301.450	2.561.072	7,15
50-54	1.106.971	1.190.650	2.297.621	6,42
55-59	980.436	1.011.511	1.991.947	5,56
60-64	751.787	731.375	1.483.162	4,14
65-69	528.724	514.717	1.043.441	2,91
70-74	305.381	347.842	653.223	1,82
>=75	440.222	516.766	956.988	2,67
<b>Jumlah</b>	<b>18.066.003</b>	<b>17.746.246</b>	<b>35.812.249</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: DinpermaDesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020*

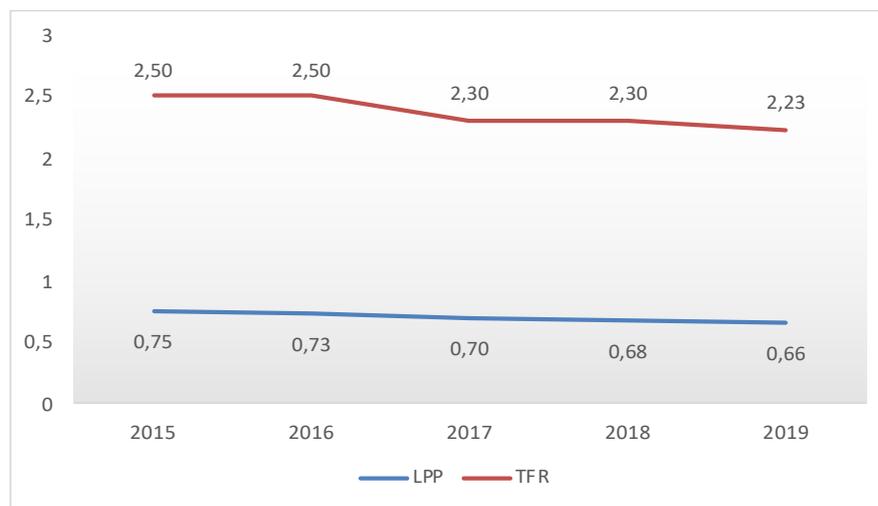
Menurut kelompok umur tahun 2019 jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Jawa Tengah sebanyak 23.516.110 jiwa atau 67,73 persen. Dan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) sebanyak 11.202.094 jiwa atau 32,27 persen dari total jumlah penduduk Jawa Tengah. Sehingga angka rasio ketergantungan di Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 47,64 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa di Jawa Tengah telah mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019 (semester I) tercatat jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 35.812.249 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 18.066.003 jiwa atau 50,45 persen dan perempuan sebanyak 17.746.246 jiwa atau 49,55 persen. Penduduk Kabupaten Brebes tercatat paling banyak di Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.842.913 jiwa atau 5,15 persen. Sedangkan penduduk Kota Magelang tercatat paling sedikit di Jawa Tengah yaitu sebanyak 129.736 jiwa atau 0,36 persen.

Penduduk Jawa Tengah di tahun 2019 didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,83 persen atau 25,37 juta jiwa. Sedangkan penduduk usia non produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,17 persen atau 29,17 juta jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Tengah selama periode waktu tahun 2015-2019 menunjukkan tren menurun setiap tahunnya. Tahun 2015, LPP Jawa Tengah sebesar 0,75 persen menurun menjadi 0,66 persen di tahun 2019. LPP juga sejalan dengan angka Total Fertility Rate (TFR) Jawa Tengah yang terus menurun selama periode tahun yang sama. Tahun 2015 TFR Jawa Tengah sebesar 2,5 menurun menjadi 2,23 di tahun 2019. Angka TFR ini menunjukkan jumlah rata-rata anak

yang dilahirkan oleh perempuan usia subur, dimana TFR yang ideal adalah di angka 2,1. Hal ini juga menunjukkan bahwa supply penduduk dari faktor kelahiran tetap konsisten, meskipun besarnya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, perkembangan LPP yang sejalan dengan TFR memperlihatkan bahwa program-program kesehatan dan pengendalian penduduk utamanya program KB di Jawa Tengah relatif cukup berhasil.



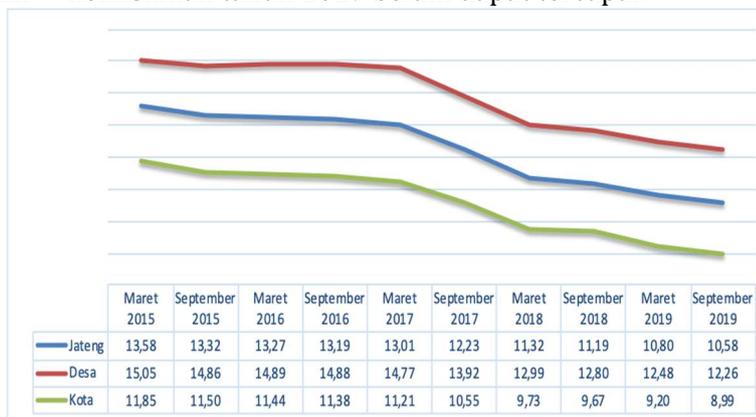
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) dan Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019**

## C. Kondisi Kemiskinan

Selama kurun waktu 2015-2019 kemiskinan di Jawa Tengah konsisten menurun. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 (September) sebanyak 3,68 juta jiwa (10,58 persen) berkurang 188,02 ribu jiwa dari 3,87 juta jiwa (11,19 persen) di tahun 2018. Meskipun konsisten menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup besar dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan, yaitu sebanyak 2.077,15 juta jiwa (12,26 persen), sedangkan di perkotaan sebanyak 1.602,26 juta jiwa (8,99 persen). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2019 yang sebesar 10,57-9,57 persen, maka angka kemiskinan tahun 2019 belum dapat tercapai.

(September) sebanyak 3,68 juta jiwa (10,58 persen) berkurang 188,02 ribu jiwa dari 3,87 juta jiwa (11,19 persen) di tahun 2018. Meskipun konsisten menurun, namun jumlah absolutnya masih



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

**Gambar 2.3** Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)

**Tabel 2.4.**

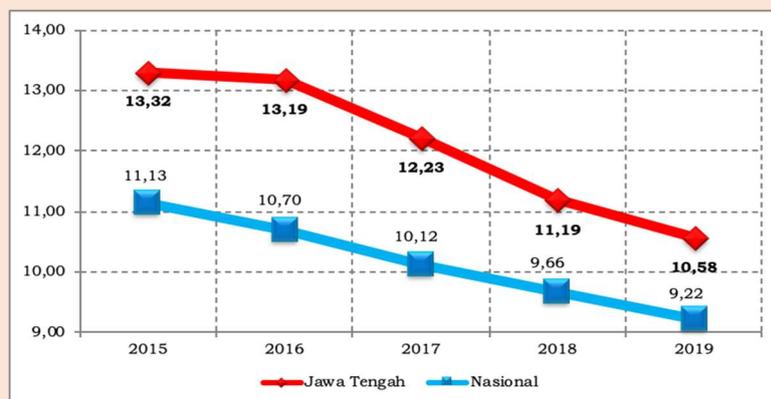
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019**

Tahun	Bulan	Jumlah (Ribu Jiwa)			Persentase (%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2015	Maret	1.837,19	2.739,85	4.577,04	11,85	15,05	13,58
	September	1.789,57	2.716,21	4.505,78	11,5	14,86	13,32
2016	Maret	1.824,08	2.682,81	4.506,89	11,44	14,89	13,27
	September	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01
	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Apabila dibandingkan dengan provinsi se Jawa-Bali, kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2018-2019 berada pada peringkat ke-2 dengan penurunan sebesar 0,61 persen. Kinerja penurunan kemiskinan Jawa Tengah ini juga lebih baik dari rata-rata nasional yang sebesar 0,44. Kinerja penurunan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang cukup

Apabila dibandingkan dengan nasional, tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional.



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015 - 2019 (%)

tinggi tersebut mengindikasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan provinsi lain di Jawa-Bali, persentase penduduk miskin Jawa Tengah tahun 2019 masih berada di posisi ke-6 dari 7 provinsi.

Tabel 2.5.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2018 - 2019

No.	Provinsi	Periode				Penurunan (%)
		September 2018		September 2019		
		(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	
1	Jawa Timur	4.292,15	10,85	4.056,00	10,20	0,65
2	Jawa Tengah	3.867,42	11,19	3.679,40	10,58	0,61
3	Jawa Barat	3.539,40	7,25	3.375,89	6,82	0,43
4	DIY	450,25	11,81	440,89	11,44	0,37
5	Banten	668,74	5,25	641,42	4,94	0,31
6	Bali	168,34	3,91	156,91	3,61	0,30
7	DKI Jakarta	372,26	3,55	362,30	3,42	0,13
	<b>Nasional</b>	<b>25.674,58</b>	<b>9,66</b>	<b>24.785,8</b>	<b>9,22</b>	<b>0,44</b>

Sumber: BPS, 2019

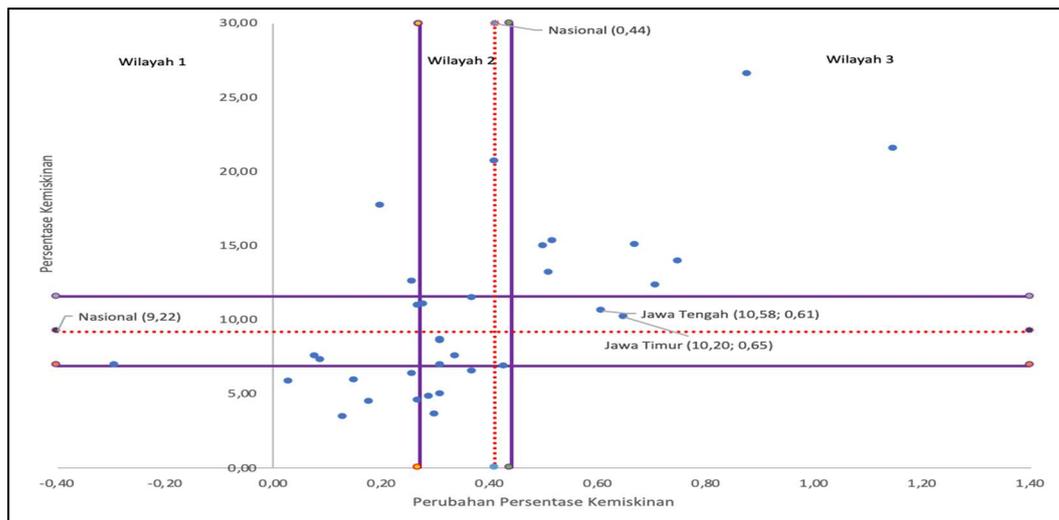
Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2019 pada rentang persentase 6,9-11,44 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 8,96 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel

perubahan persentase penduduk miskin tahun 2018-2019 pada rentang 0,43-1,15 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata sebesar 0,67 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara. Dan jika membandingkan kedua variabel tersebut, maka wilayah yang setara dengan Jawa Tengah adalah Jawa Timur.

**Tabel 2.6.**  
**Persentase Kemiskinan Tahun 2019 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2018-2019 Di Wilayah Setara**

<i>Provinsi</i>	<i>Persentase Kemiskinan (%)</i>	<i>Perubahan Persentase Kemiskinan (Poin)</i>	<i>Provinsi</i>
Riau	6,90	1,15	Papua Barat
Maluku Utara	6,91	0,88	Papua
Kalimatan Barat	7,28	0,75	Nusa Tenggara Barat
Jambi	7,51	0,71	Lampung
Sulawesi Utara	7,51	0,67	Aceh
Sulawesi Selatan	8,56	0,65	Jawa Timur
Sumatra Utara	8,63	0,61	Jawa Tengah
Jawa Timur	10,20	0,52	Gorontalo
Jawa Tengah	10,58	0,51	Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat	10,95	0,50	Bengkulu
Sulawesi Tenggara	11,04	0,43	Jawa Barat
DI Yogyakarta	11,44	0,67	<b>Rata-Rata</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>8,96</b>		

Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)



Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)

**Gambar 2.5** Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Dengan Provinsi Lain dan Nasional

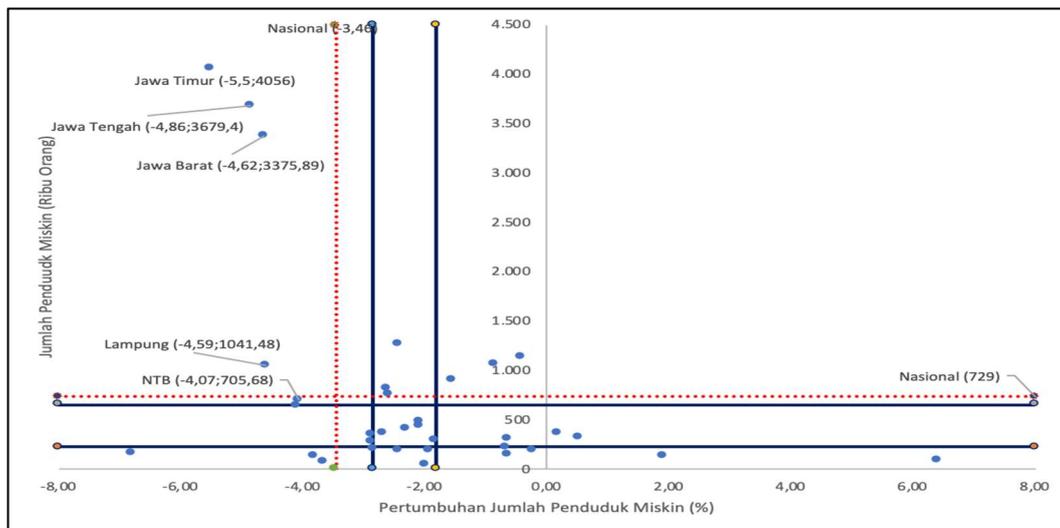
Dilihat dari jumlah penduduk miskin tahun 2019, dan pertumbuhan penduduk miskin tahun 2018-2019 di Indonesia, sebanyak 10 provinsi berada pada wilayah yang setara dengan Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk miskin wilayah setara yang sebesar minus 4,34 persen atau turun sebesar 4,34 persen, maka pertumbuhan atau penurunan penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah setara, dimana penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah sebesar 5,5 persen. Provinsi yang masuk dalam kelompok wilayah setara dengan Jawa Tengah dari hasil perbandingan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhannya yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 2.7.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Tahun 2018-2019 Di Wilayah Setara**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)	Provinsi
Jawa Timur	4.056,00	-6,79	Bali
Jawa Tengah	3.679,40	-5,50	Jawa Timur
Jawa Barat	3.375,89	-4,86	Jawa Tengah
Sumatra Utara	1.260,50	-4,62	Jawa Barat
Nusa Tenggara Timur	1.129,46	-4,59	Lampung
Sumatra Selatan	1.067,16	-4,09	Banten
Lampung	1.041,48	-4,07	Nusa Tenggara Barat
Papua	900,95	-3,82	Kalimantan Tengah
Aceh	809,76	-3,66	Kepulauan Bangka Belitung
Sulawesi Selatan	759,58	-2,88	Jambi
Nusa Tenggara Barat	705,68	-2,87	Sumatra Barat
<b>Rata-Rata</b>	<b>1.707,81</b>	<b>4,34</b>	<b>Rata-Rata</b>

Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)

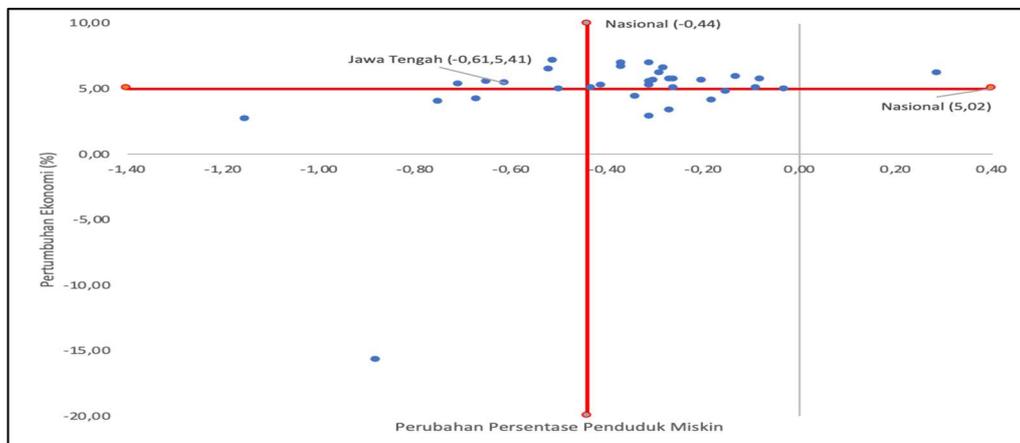
Jika dibandingkan dengan nasional, rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional, dimana angka nasional sebesar minus 3,46 persen atau turun sebesar 3,46 persen.



Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)

**Gambar 2.6** **Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2019 dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2019 Dengan Provinsi Lain dan Nasional**

Perubahan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2018-2019 yang turun sebesar 0,61 poin persen, dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang sebesar 5,41 persen menggambarkan kinerja ekonomi yang positif dan inklusif. Karena ekonomi Jawa Tengah dapat tumbuh di atas rata-rata nasional dibarengi dengan penurunan kemiskinan yang juga lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.

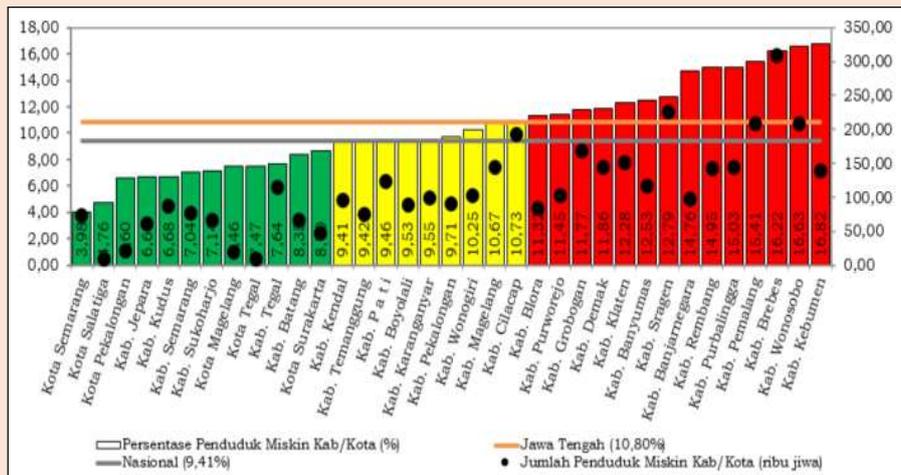


Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)

**Gambar 2.7** Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2019 Dengan Provinsi Lain dan Nasional

Persebaran penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/ kota berdasarkan data per Maret tahun 2019 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) sebagai berikut:

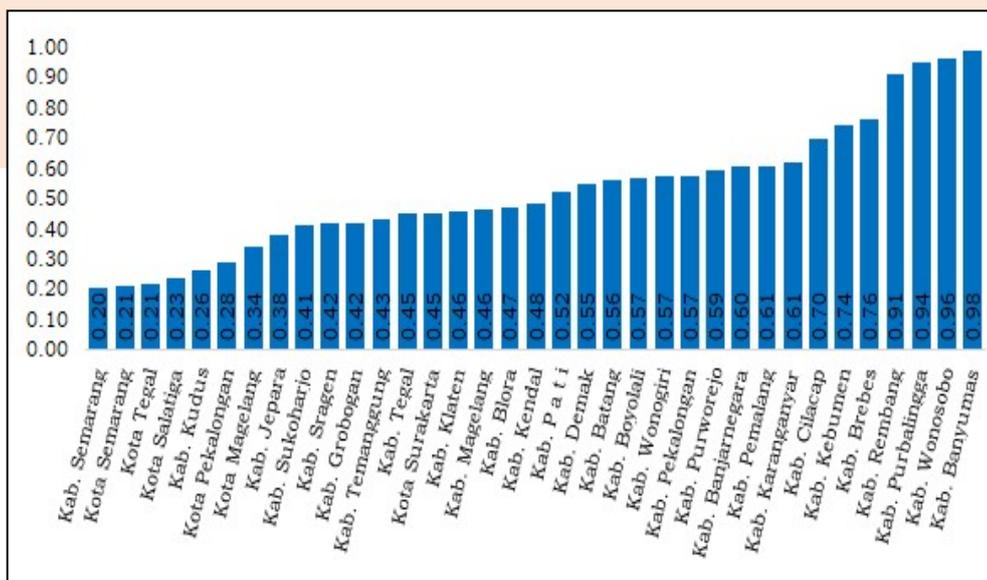
1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten meliputi Kabupaten Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Banjarnegara, Rembang, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 9 kabupaten meliputi Kabupaten Kendal, Temanggung, Pati, Boyolali, Karanganyar, Pekalongan, Wonogiri, Magelang, dan Cilacap;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta.



Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret)

Apabila dilihat dari rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/ kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2015-2019), Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar 0,98 persen, dan terendah adalah Kabupaten Semarang (0,20 persen).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

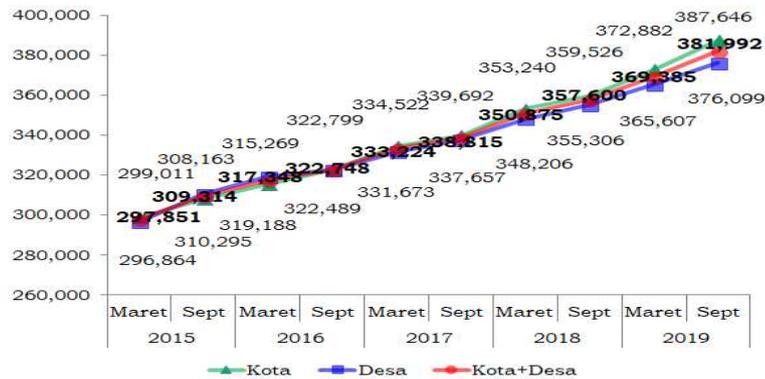
Gambar 2.9 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)

Garis kemiskinan merupakan batas yang dipergunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2019 sebesar Rp. 381.992,00 per kapita per bulan, meningkat 6,82 persen

dibandingkan dengan September 2018 yang mencapai Rp. 357.600,00 perkapita per bulan. Pada

periode waktu yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp. 387.646,00 per kapita per bulan atau naik 7,82 persen dari tahun 2018 (Rp. 359.526,00 per kapita per bulan). Garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,85 persen menjadi sebesar Rp. 376.099,00 per kapita per bulan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 355.306,00 per kapita per bulan.



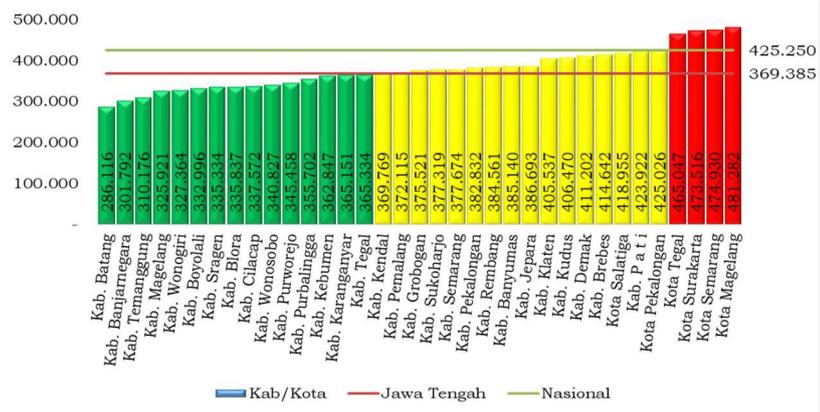
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015-2019

Gambar 2.10 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Blora, Cilacap, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar dan Tegal;
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 16 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kendal, Pemalang, Grobogan, Sukoharjo, Semarang, Pekalongan, Rembang, Banyumas, Jepara, Klaten, Kudus, Demak, Brebes, Pati, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan;
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan nasional, terdapat di 4 kota, yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Magelang.

Kabupaten/ Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp. 286.116,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Magelang sebesar Rp. 481.282,- per



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.11 Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret)

Komponen yang mempengaruhi garis kemiskinan adalah bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2019 (September) baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter,

Tabel 2.8. Komoditi Makanan dan Bukan Makanan Yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2019 (September)

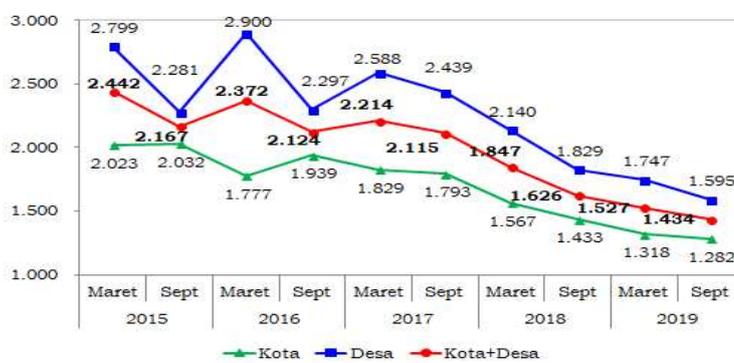
Komoditi	Perkotaan		Perdesaan	
	Kontribusi (%)	Komoditi	Kontribusi (%)	Komoditi
<b>Makanan</b>	<b>73,29</b>	<b>Makanan</b>	<b>75,07</b>	
Beras	20,36	Beras	23,55	
Rokok kretek filter	10,26	Rokok kretek filter	8,91	
Telur ayam ras	4,22	Telur ayam ras	4,30	
Daging ayam ras	3,99	Gula pasir	3,08	
Gula pasir	2,76	Tempe	2,70	
Tempe	2,39	Daging ayam ras	3,47	
Mie instan	2,41	Tahu	2,30	
Roti	1,77	Mie instan	2,64	
Kue basah	2,24	Kue Basah	2,15	
Tahu	1,90	Cabe Rawit	1,94	
Lainnya	20,99	Lainnya	20,03	
<b>Bukan Makanan</b>	<b>26,71</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>24,93</b>	
Perumahan	6,02	Perumahan	5,92	
Bensin	5,11	Bensin	4,73	
Listrik	3,20	Listrik	2,02	
Pendidikan	2,05	Pendidikan	1,36	
Perlengkapan mandi	1,16	Kesehatan	1,12	
Lainnya	9,17	Lainnya	9,78	
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar

terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan perumahan, bensin, listrik, pendidikan, kesehatan dan perlengkapan mandi.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Demikian pula semakin tinggi Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015-2019

**Gambar 2.17** Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019

sebesar 2,442. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2019 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2019, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,282 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 1,595. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Dengan melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2019 dan perubahannya tahun 2018-2019, diketahui bahwa terdapat 2 provinsi

yang setara dengan Jawa Tengah, dan berada pada rentang persentil yang sama dengan Jawa Tengah yaitu DI Yogyakarta dan Sumatera Utara.

Selama periode Maret 2015 - September 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah telah mengalami penurunan. Pada periode September 2019 sebesar 1,434 lebih baik dibandingkan dengan periode Maret 2015 yaitu

Sementara jika dilihat dari perubahan P1 tahun 2018-2019 terdapat 11 provinsi wilayah setara, dengan rata-rata perubahan atau penurunan P1 sebesar 0,34. Jika dibandingkan dengan rata-rata perubahan P1 wilayah setara

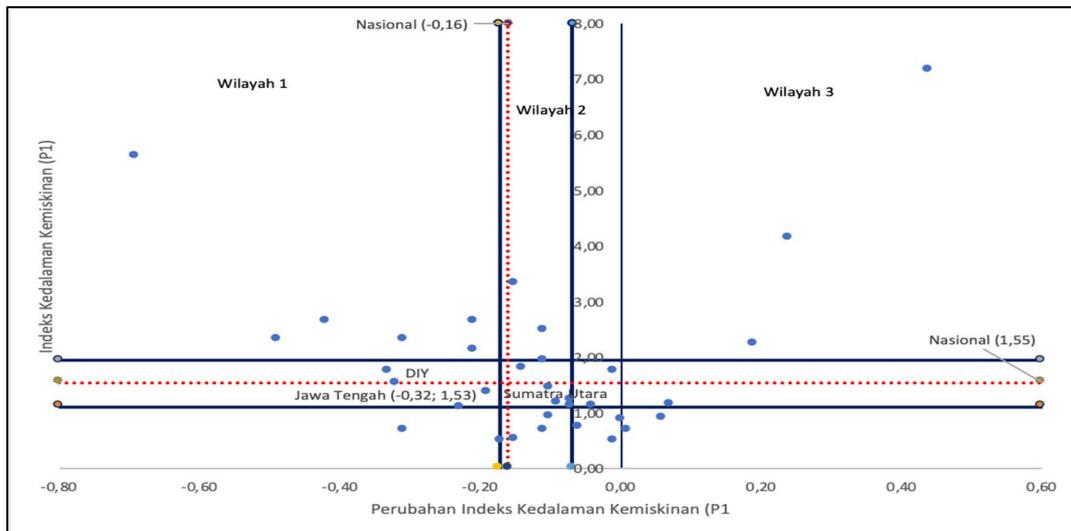
ini, perubahan P1 Jawa Tengah masih di bawah atau lebih rendah dari rata-rata wilayah setara. Meskipun demikian jika dibandingkan rata-rata nasional, perubahan P1 dan P1 Jawa Tengah lebih baik dari rata-rata nasional.

Tabel 2.9.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 dan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2019 Di Wilayah Setara

Provinsi	Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Provinsi
Papua Barat	-0,69	1,13	Riau
Nusa Tenggara Barat	-0,49	1,14	Kalimantan Barat
Gorontalo	-0,42	1,16	Kalimantan Utara
DI Yogyakarta	-0,33	1,18	Sulawesi Utara
Jawa Tengah	-0,32	1,23	Jambi
Kepulauan Riau	-0,31	1,37	Sumatra Utara
Sulawesi Tengah	-0,31	1,45	Sulawesi Selatan
Jawa Barat	-0,23	1,53	Jawa Tengah
Aceh	-0,21	1,74	DI Yogyakarta
Sumatra Selatan	-0,21	1,75	Sulawesi Barat
Sumatra Utara	-0,19	1,80	Jawa Timur
Rata-Rata	-0,34	1,93	Lampung
		1,45	Rata-Rata

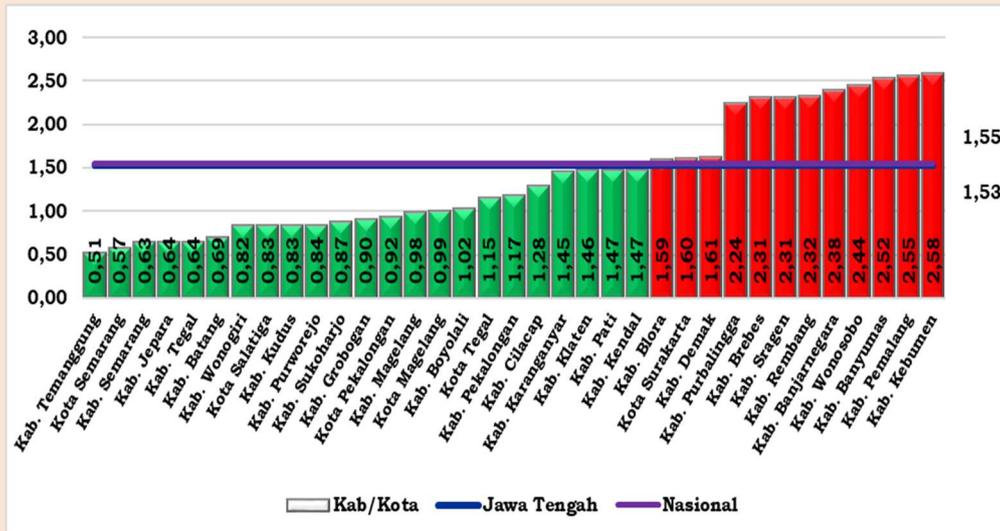
Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)



Sumber: BPS, 2020 (hasil analisis)

Gambar 2.13 Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019 dan Perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2018-2019 Dengan Provinsi Lain dan Nasional

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/ kota pada periode Maret 2019, apabila dibandingkan dengan Provinsi (1,53) dan Nasional (1,55), diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 2,58 dan Kabupaten Temanggung terendah sebesar 0,51.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

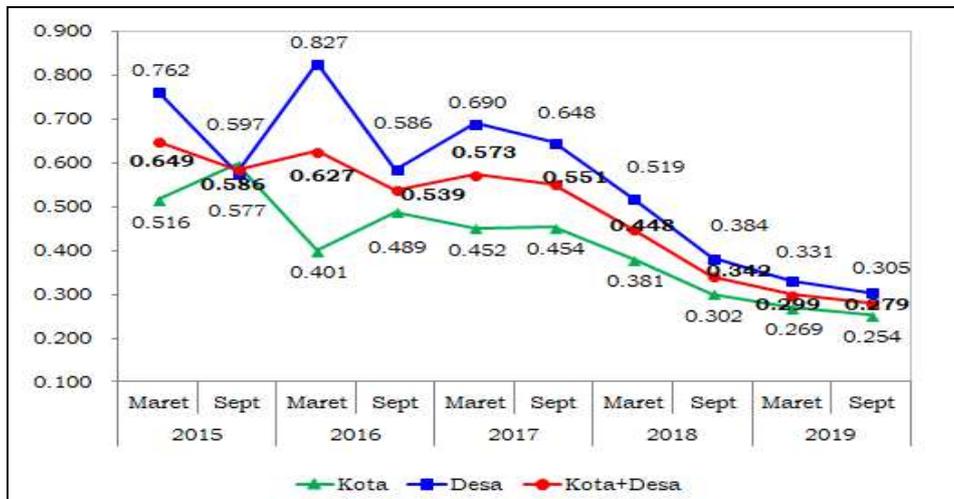
**Gambar 2.14** Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019 (Maret)

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang P1-nya di atas provinsi dan nasional, sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Blora, Demak, Purbalingga, Brebes, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Kebumen, dan Kota Surakarta;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang P1-nya di bawah nasional dan di atas provinsi, tidak ada kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan sedang;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang P1-nya di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 23 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Temanggung, Semarang, Jepara, Tegal, Batang, Wonogiri, Kudus, Purworejo, Sukoharjo, Grobogan, Magelang, Boyolali, Pekalongan, Cilacap, Karanganyar, Klaten, Pati, Kendal, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Magelang, dan Tegal.

Selain Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selama periode Maret 2015-September 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu turun dari 0,649 menjadi 0,279. Sampai dengan September 2019

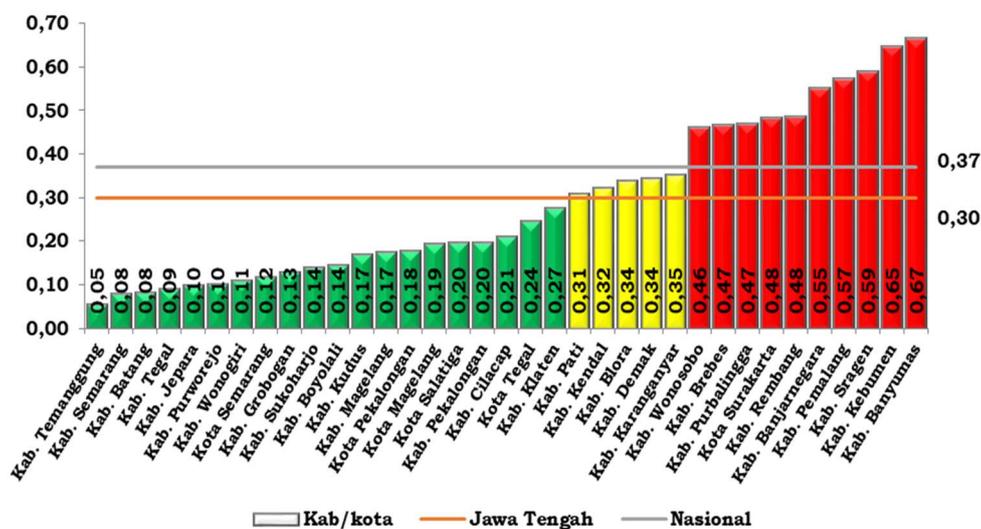
Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan (0,305) masih lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (0,254). Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015-2019

Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/ Kota pada periode Maret 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki indeks tertinggi (0,67) dan Kabupaten Temanggung terendah (0,05).

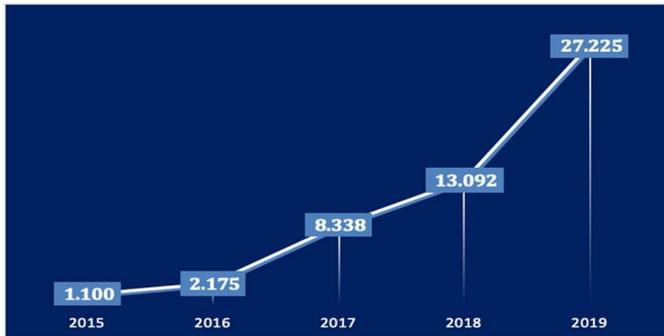


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.16 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, Dan Nasional Tahun 2019 (Maret)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 (Maret) sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang P2-nya diatas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Wonosobo, Brebes, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Pemalang, Sragen, Kebumen, Banyumas, dan Kota Surakarta;
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang P2-nya dibawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 5 kabupaten meliputi Kabupaten Pati, Kendal, Blora, Demak, dan Karanganyar;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang P2-nya di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 20 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Temanggung, Semarang, Batang, Tegal, Jepara, Purworejo, Wonogiri, Grobogan, Sukoharjo, Boyolali, Kudus, Magelang, Pekalongan, Cilacap, Klaten, Kota Semarang, Pekalongan, Magelang, Salatiga, dan Tegal.

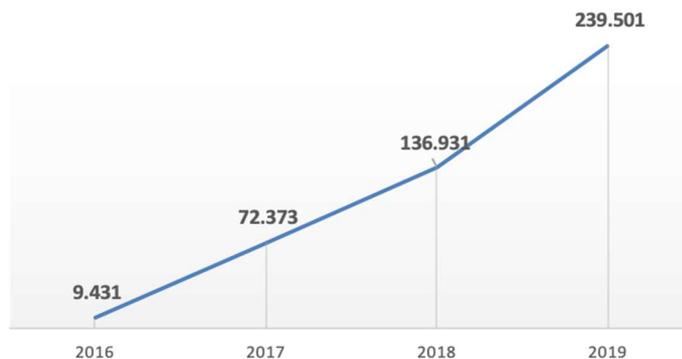


Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.17 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Yang Tersambung Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin antara lain dilakukan melalui pemenuhan sambungan listrik murah, rumah layak huni, dan pembiayaan kesehatan. Pemenuhan sambungan listrik di perdesaan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Setiap tahunnya pemenuhan terhadap sambungan listrik murah mengalami peningkatan dan hingga tahun 2019 telah tersambung listrik bagi 27.225 RTM dari total RTM sejumlah 211.998 RTM di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk pemenuhan perumahan melalui stimulan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan stimulan RTLH tersebut didukung peran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR, dan swadaya/lainnya. Selama kurun waktu 2016 - 2019 RTLH secara agregat yang tertangani sejumlah 239.501 unit RTLH.



Sumber: Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, 2020

**Gambar 2.18 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2019 (Unit)**

Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin lainnya adalah pembiayaan kesehatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar. Pada tahun 2019 penerima manfaat jamkesda mengalami lonjakan dari tahun 2018, hal ini dikarenakan kabupaten/kota tidak mampu mengcover PBI sehingga diambil alih oleh Provinsi. Tantangan ke depan adalah adanya kenaikan iuran BPJS kelas III dari Rp. 23.000 menjadi Rp. 42.000 sehingga akan ada lonjakan anggaran dua kali lipat jika tetap mempertahankan kuota PBI yang sudah ada..

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin-Rentan Miskin	Jumlah yang menerima Jamkesmas	%	Jumlah yang menerima Jamkesda	%
2015	15.758.436	14.151.037	89,80	1.300.587	8,25
2016	15.758.436	14.152.522	89,81	1.605.914	10,19
2017	15.758.436	15.405.248	97,76	926.342	5,88
2018	15.522.000	15.449.972	99,54	357.962	2,31
2019	15.758.436	15.857.903	100,63	855.559	5,43

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2020



**Gubernur Jawa Tengah bersama BPJS genjot kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi berbagai media**

Sumber Foto: <https://www.gesuri.id/pemerintahan/ganjar-harap-bpjs-sosialisai-melalui-media-sosial-b1T4cZdKU>

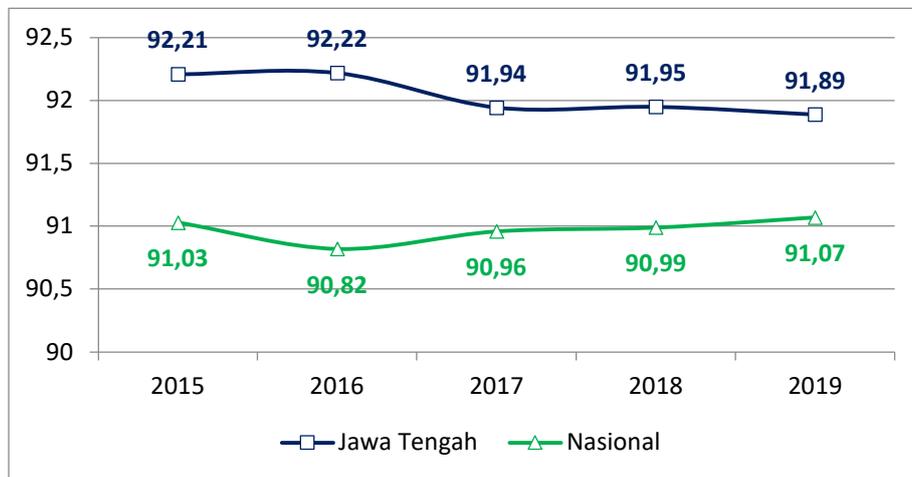
# BAB III ANALISIS IPG DAN IDG

## A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasioikan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

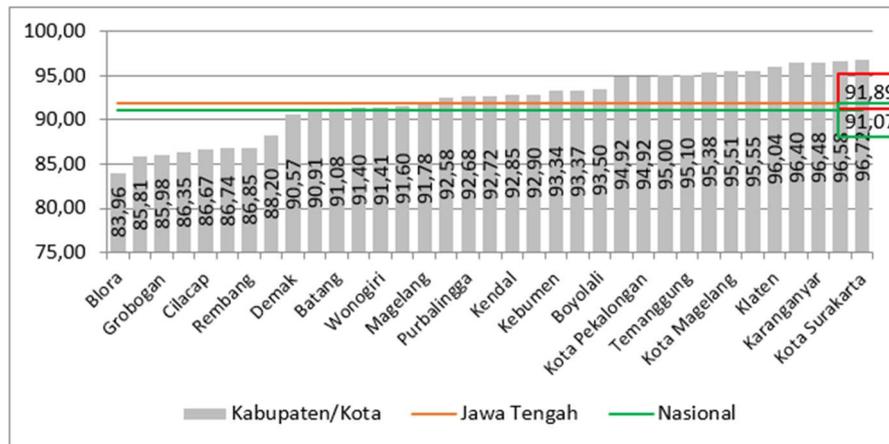
IPG Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu dari sebesar 92,21 pada 2015, naik menjadi sebesar 92,22 pada tahun 2016, kemudian turun menjadi 91,94, lalu sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2018, menjadi sebesar 91,95, dan terakhir pada 2019 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 91,89. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi IPG Nasional yang cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir.



Sumber: BPS 2020

**Gambar 3.1** Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagian besar telah melampaui capaian IPG Jawa Tengah. Di antara seluruh Kabupaten/Kota, IPG terendah di bawah IPG Provinsi Jawa Tengah (91,89) dan IPG Nasional (91,07) berada di 10 kabupaten/kota, yaitu Blora, Pemalang, Grobogan, Brebes, Cilacap, Tegal, Rembang, Banyumas, Demak, Jepara, Batang, Sragen, Wonogiri, dan Pati. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



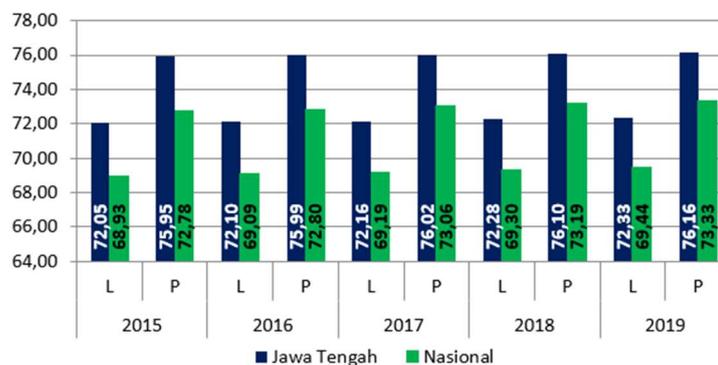
Sumber: BPS, 2020

**Gambar 3.2** Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019

## 1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (life expectancy) adalah rata-rata estimasi lamanya tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH).

Harapan Hidup (AHH) menurut jenis kelamin tahun 2015 hingga tahun 2019, provinsi Jawa Tengah mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya. AHH laki-laki pada tahun 2015 sebesar 72,05 tahun meningkat menjadi sebesar 72,33 tahun pada tahun 2019. Kondisi tersebut sama dengan AHH perempuan yang mengalami

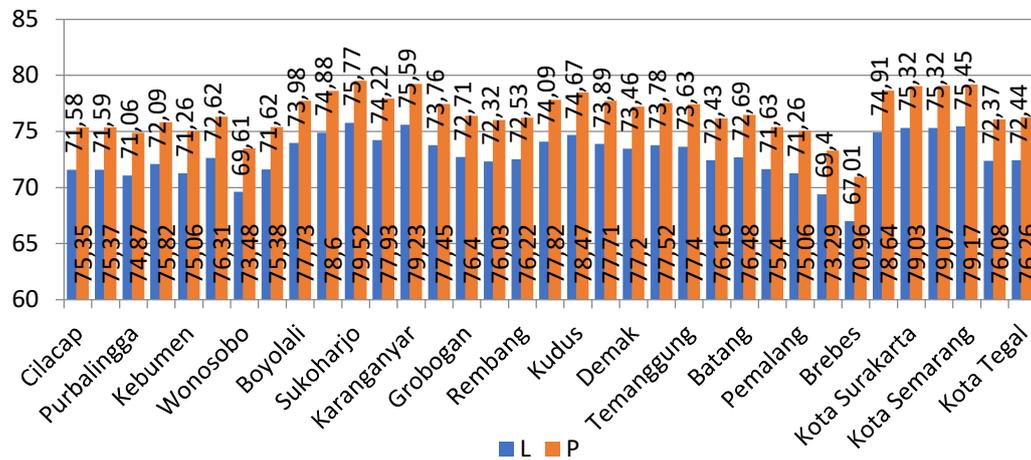


Sumber: BPS, 2020

**Gambar 3.9** Perkembangan Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 75,96 tahun naik menjadi 76,16 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Angka Harapan Hidup (AHH) pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah didominasi oleh AHH perempuan. Di antara seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Angka Harapan Hidup perempuan yang angkanya lebih rendah dari AHH Perempuan Provinsi Jawa Tengah (76,16 tahun) dan Nasional (73,33 tahun) berada di 2 (dua) kabupaten/kota, yaitu Brebes dan Tegal. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS, 2020

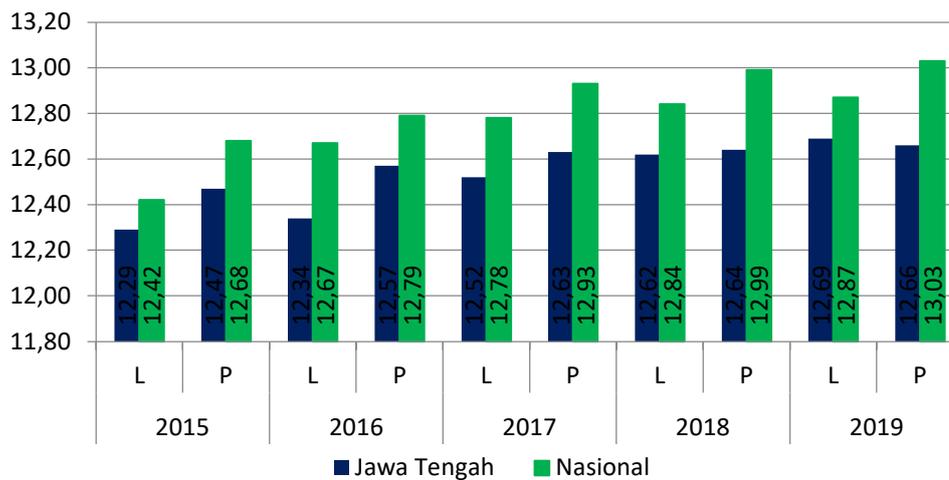
**Gambar 3.4** Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019

## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (expected years of schooling) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Harapan lama sekolah dihitung menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), namun untuk penduduk yang tidak tercakup dalam susenas yaitu siswa yang bersekolah di pesantren maka dilakukan koreksi terhadap HLS.

Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2015 hingga tahun 2019, provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki pada tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu sebesar 12,29 tahun, meningkat menjadi sebesar 12,69 tahun. Sama halnya dengan jenis kelamin perempuan, dimana pada tahun 2015 sebesar 12,47 tahun meningkat menjadi sebesar 12,66 tahun. Peningkatan harapan lama sekolah ini dipicu dari berbagai program pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya program percepatan sekolah baik pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota maupun pendidikan menengah

yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

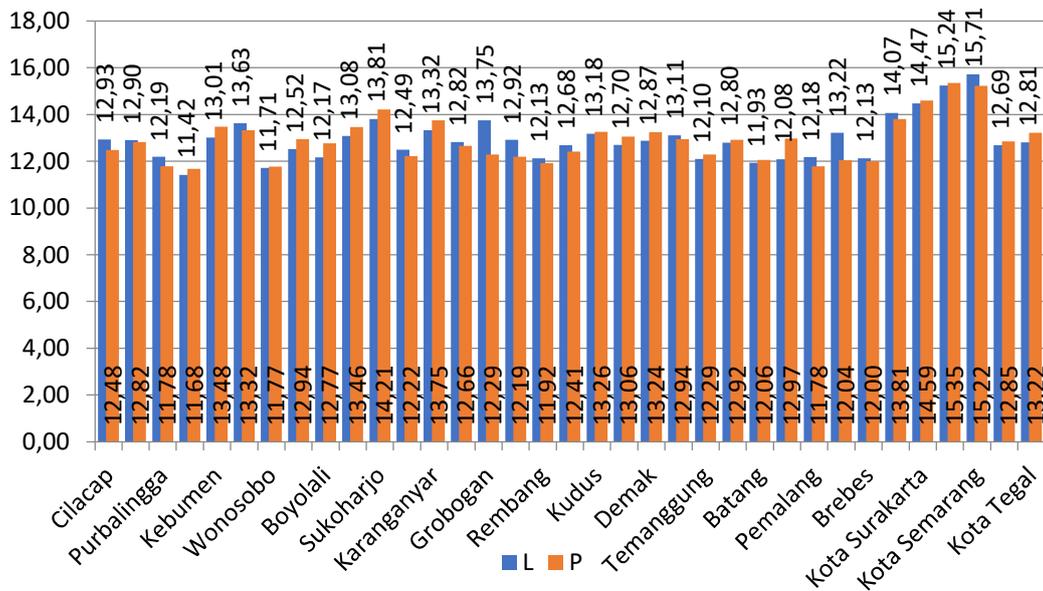


Sumber: BPS, 2020

**Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

Harapan Lama Sekolah (HLS) pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah didominasi oleh HLS perempuan. Di antara seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Harapan Lama Sekolah perempuan yang angkanya lebih rendah dari HLS perempuan Provinsi Jawa Tengah (12,66 tahun) dan Nasional (13,03 tahun) berada di 12 Kabupaten/Kota, yaitu Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Pemalang, Rembang, Brebes, Tegal, Batang, Blora, Wonogiri, Grobogan, dan Temanggung.

Harapan Lama Sekolah dari 12 kabupaten kota tersebut secara khusus ada tiga kabupaten kota yang memiliki angka dibawah 12, yaitu Kabupaten Wonosobo, Purbalingga dan Banjarnegara. Ketiga kabupaten tersebut berada di wilayah selatan yang memiliki topografi pegunungan. Aksesibilitas dalam pencapaian sarana prasarana sekolah, barangkali menjadi salah satu dari berbagai alasan masih rendahnya HLS. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2020

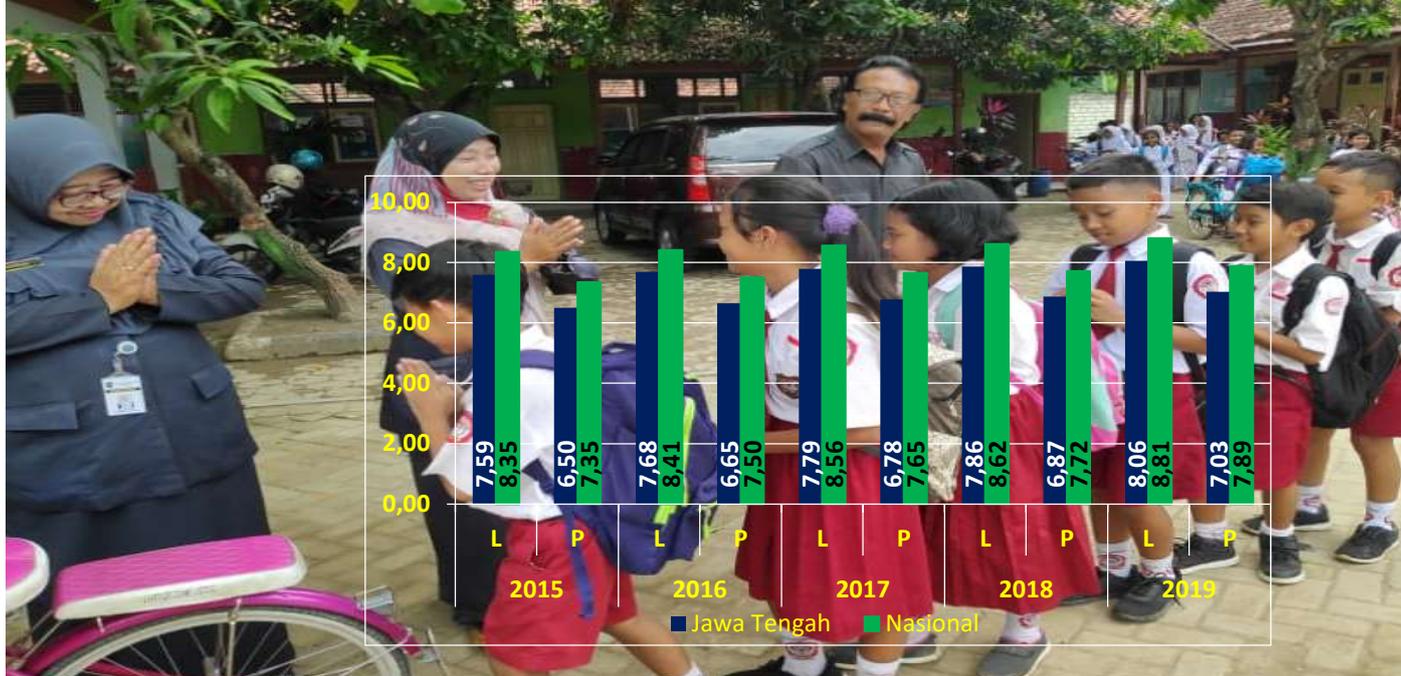
**Gambar 3.6 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019**

### 3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.

Penghitungan rata-rata lama sekolah berangkat dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, yang dihitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut. Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0. Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolahnya mengikuti konversi ijazah terakhir plus satu.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2015 hingga tahun 2019, provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, pada tahun 2015, RLS provinsi Jawa Tengah sebesar 7,59 tahun naik menjadi sebesar 8,06 tahun pada 2019. Sama halnya dengan berjenis kelamin perempuan dimana pada tahun 2015 sebesar 6,50 tahun naik menjadi sebesar 7,03 tahun pada tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber Foto:  
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/rembang-siapkan-skenario-masuk-sekolah-dalam-kondisi-new-normal/>

Sumber: BPS, 2020

**Gambar 3.7 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah didominasi oleh RLS laki-laki. Di antara seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan yang angkanya lebih rendah dari RLS perempuan Provinsi Jawa Tengah (7,03 tahun) dan Nasional (7,89 tahun) berada di 20 kabupaten/kota, yaitu Brebes, Pemalang, Blora, Batang, Tegal, Banjarnegara, Grobogan, Cilacap, Wonosobo, Pekalongan, Sragen, Rembang, Kendal, Pati, Wonogiri, Purbalingga, Temanggung, Jepara, Demak, dan Boyolali.

Memperhatikan 20 kabupaten kota yang rata-rata lama sekolah dibawah posisi Jawa Tengah, angka untuk perempuan berada dibawah 7 tahun, bahkan terdapat dua kabupaten kota yaitu Kabupaten Pemalang dan Brebes yang masih berada dibawah 6 tahun. Artinya perempuan di 20 kabupaten kota rata-rata lama sekolah kurang dari 7 tahun dan belum mencapai 9 tahun wajib belajar dasar. Bahkan kondisi rata-rata lama sekolah perempuan Jawa Tengah yang baru mencapai 7.03 juga belum mendapatkan wajar diksar. Selengkapnya data dapat dilihat pada gambar berikut.



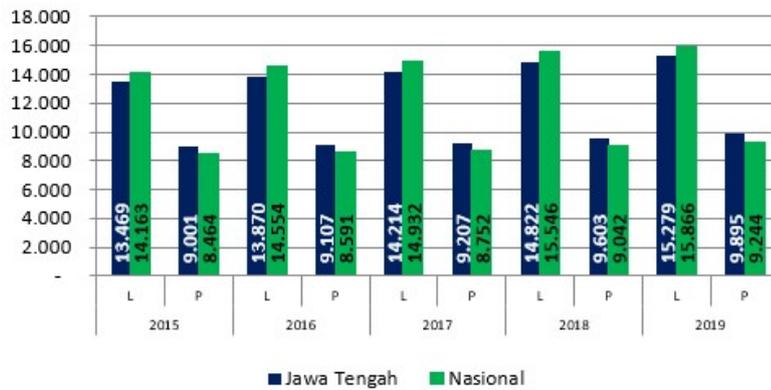
Minyak Pelumas, Meubelair, Peralatan Rumah Tangga, Perlengkapan perabot rumah tangga, Alat-alat Dapur/Makan.

Pengeluaran perkapita provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 hingga 2019 sama-sama mengalami kenaikan.

Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, Pengeluaran per Kapita pada tahun 2015 sebesar Rp13.469 ribu naik menjadi sebesar Rp15.279

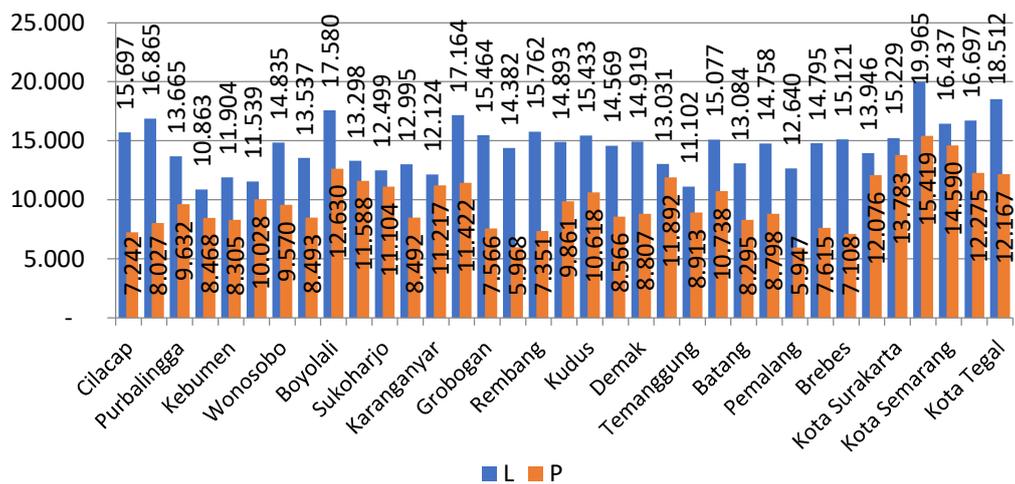
ribu pada tahun 2019. Sama halnya dengan jenis kelamin perempuan yang mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2015 sebesar Rp9.001 ribu naik menjadi sebesar Rp4.321 ribu pada tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Pengeluaran Per Kapita pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah didominasi oleh laki-laki. Di antara seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Pengeluaran Per Kapita perempuan yang angkanya lebih rendah dari RLS Provinsi Jawa Tengah (Rp9.895) dan Nasional (Rp9.244) berada di 17 kabupaten/kota, yaitu Pemalang, Blora, Brebes, Cilacap, Rembang, Grobogan, Tegal, Banyumas, Batang, Kebumen, Banjarnegara, Wonogiri, Magelang, Jepara, Pekalongan, Demak, dan Temanggung. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS 2020

**Gambar 3.9** Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS 2020

**Gambar 3.10** Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Penurunan IPG Jawa Tengah ini disebabkan lambatnya kenaikan komposit pembentuk IPM perempuan dibandingkan laki-laki. Seperti diketahui IPG diukur dari perbandingan IPM Perempuan terhadap IPM Laki-laki. Jika dilihat selisih kenaikan IPM dapat diketahui bahwa kenaikan IPM Laki-laki dari tahun 2018-2019 lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan, meskipun selisih antar tahun mengalami kenaikan antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 3.1.**  
Analisis Capaian IPM Perempuan dan Laki-laki  
Jawa Tengah Tahun 2018-2019

Tahun	P	L	Kenaikan IPM Berdasarkan Tahun Capaian IMP		Selisih Antar Tahun Antar Jenis Kelamin	IPG
			P	L		
2018	69,08	75,13	0,56	0,66	6,05	91,95
2019	69,64	75,79			6,15	91,89

Sumber : Diolah dari Data Terbitan BPS 2020

Jika diperhatikan dari komposit pembentuk IPM, didapatkan data capaian masing-masing pembentuk IPM laki-laki peningkatnya lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini bisa disimak dari table berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Analisis Capaian Pembentuk Perempuan dan Laki-laki Jawa Tengah**  
**Tahun 2018-2019**

Komponen IPM	Laki-Laki		Kenaikan	Perempuan		Kenaikan
	2018	2019		2018	2019	
<b>AHH</b>	72,28	72,33	0,05	69,08	69,64	0,56
<b>Rata-Rata LS</b>	7,86	8,06	0,2	6,87	7,03	0,16
<b>Harapan LS</b>	12,62	12,69	0,07	12,64	12,66	0,02
<b>Pengeluaran Per Kapita</b>	14.822	15.279	457	9.603	9.895	292

Sumber : Diolah dari Data Terbitan BPS 2020

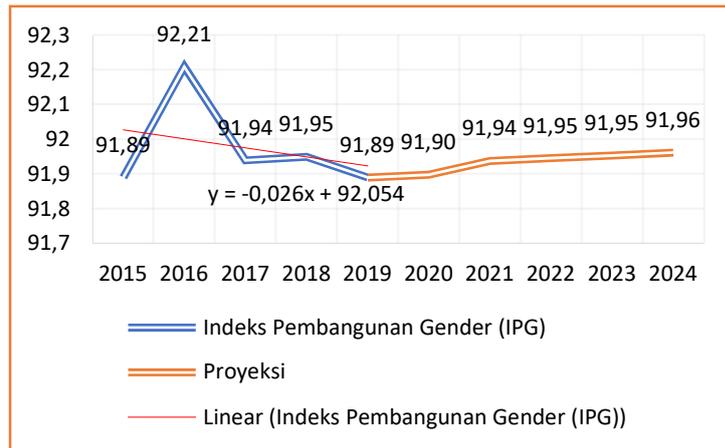
Dilihat dari data tabel 2 hanya AHH Perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan komposit lain capaian laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Jika memperhatikan data tersebut, selisih IPM meningkat namun selisih antar jenis kelamin meningkat, akibatnya angka IPG menurun.

Beberapa penyebab yang diperkirakan atas penurunan ini adalah dari aspek pendidikan dan aspek ekonomi.

1. Pendidikan perempuan usia 25 tahun keatas masih rendah
2. Pendapatan perempuan rendah dan mereka termarginal dalam jabatan kelas terendah.
3. Tingkat upah perempuan rendah
4. Banyak perempuan yang bekerja pada keluarga besar yang mengandalkan upah materiil, atau bahkan tanpa upah.
5. Perempuan miskin yang menjadi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRT), tidak memiliki akses atas bantuan sosial akibat tidak dimilikinya identitas hukum berupa surat cerai. Status hukum dalam Kartu Keluarga masih tercantum kepala keluarga adalah mantan suami. Akibatnya aksesibilitas mendapatkan bantuan sosial dan sejenisnya hilang.
6. KRT Perempuan yang bekerja, namun akses atas bantuan UMKM yang mensyaratkan penerima bantuan harus KK tidak mampu diakses. Kelompok rentan juga memiliki hal yang sama.

## 5. Proyeksi IPG

Melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu  $y = -0,026x + 92,054$  sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 91,90.



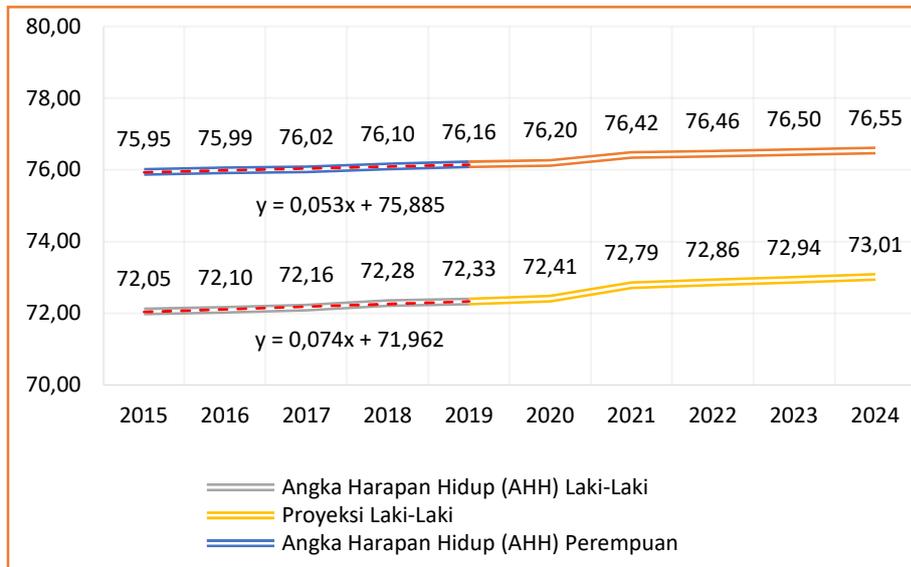
Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.11** Proyeksi IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 0,008x + 92,054$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 91,94, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 91,95, pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 91,95 (stagnan), pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 91,96, seperti terlihat pada gambar berikut.

### a. Proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH)

Melihat perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu laki-laki ( $y = 0,074x + 71,962$ ) dan perempuan ( $y = 0,053x + 75,885$ ) sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu laki-laki (72,41 tahun) dan perempuan (76,20 tahun). Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu laki-laki ( $y = 0,076x + 72,254$ ) dan perempuan ( $y = 0,043x + 76,117$ ) sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7, laki-laki = 72,79 tahun dan perempuan = 76,42 tahun), pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8, laki-laki = 72,86 tahun dan perempuan = 76,46 tahun), pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9, laki-laki = 72,94 tahun dan perempuan = 76,50 tahun), pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10, laki-laki = 73,01 tahun dan perempuan = 76,55 tahun), seperti terlihat pada gambar berikut.



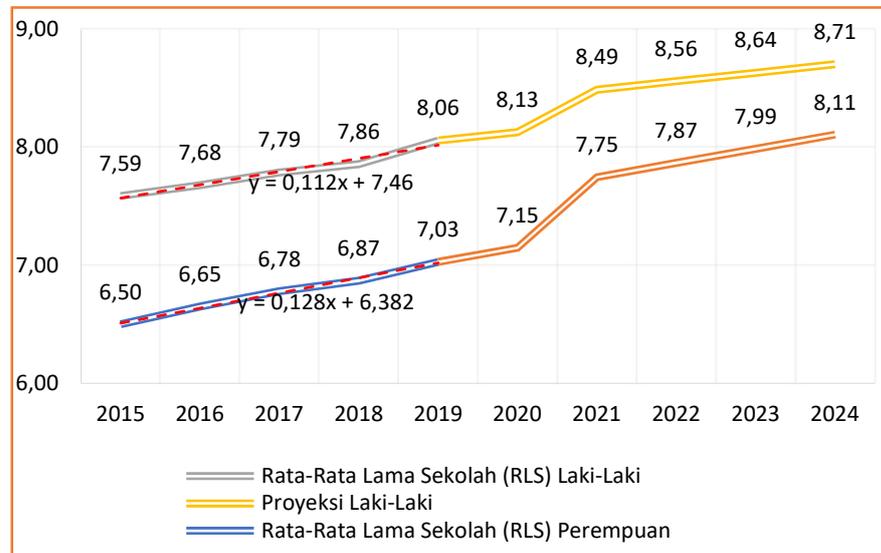
Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.12** Proyeksi AHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

### b. Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Melihat perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Laki-Laki dan Perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu laki-laki ( $y = 0,1124x + 7,46$ ) dan perempuan ( $y = 0,128x + 6,382$ ) sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu laki-laki (8,13 tahun) dan perempuan (7,15 tahun). Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu laki-laki ( $y = 0,072x + 7,988$ ) dan perempuan ( $y = 0,12x + 6,91$ ) sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7, laki-laki = 8,49 tahun dan perempuan = 7,75 tahun).

Pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8, laki-laki = 8,56 tahun dan perempuan = 7,87 tahun), pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9, laki-laki = 8,64 tahun dan perempuan = 7,99 tahun), pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10, laki-laki = 8,71 tahun dan perempuan = 8,11 tahun), seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

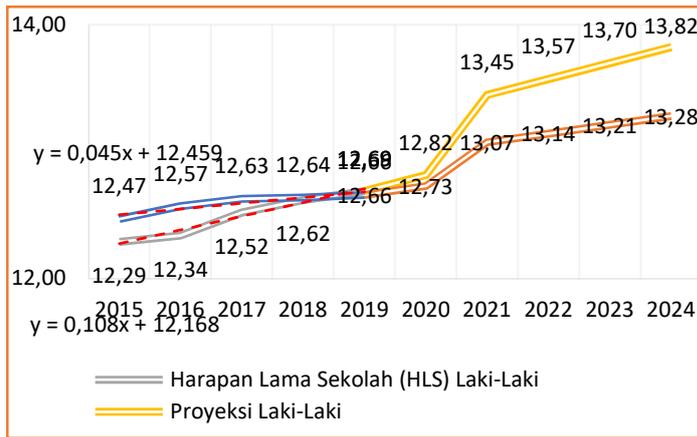
**Gambar 3.13** Proyeksi RLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, secara tidak langsung penduduk usia 25 tahun ke atas baik yang berpendidikan di bawah SMA dan SMA ke atas dipaksa memiliki/familiar menggunakan gadget minimal smartphone dalam memfasilitasi keluarga yang masih menempuh pendidikan formal (sekolah daring). Kesempatan ini, pemerintah Provinsi dapat berinovasi online. PNF selama ini melalui PKBM (Paguyuban Kelompok Belajar Masyarakat) namun minat relatif rendah. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir, kebijakan social distancing dan PSBB akan terus berlanjut, sehingga aktivitas di rumah saja akan menjadi rutinitas.

#### a. Proyeksi Harapan Lama Sekolah (HLS)

Melihat perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki dan Perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu laki-laki ( $y = 0,108x + 12,168$ ) dan perempuan ( $y = 0,045x + 12,459$ ) sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada

tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu laki-laki (12,82 tahun) dan perempuan (12,73 tahun). Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi liner pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu



Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.14** Proyeksi HLS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

laki-laki ( $y = 0,126x + 12,564$ ) dan perempuan ( $y = 0,069x + 12,591$ ) sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7, laki-laki = 13,45 tahun dan perempuan = 13,07 tahun).

Pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8, laki-laki = 13,57 tahun dan perempuan = 13,14 tahun), pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9, laki-laki = 13,70 tahun dan perempuan = 13,21 tahun), pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10, laki-laki = 13,82 tahun dan perempuan = 13,28 tahun).

Memperhatikan grafik di atas, HLS perempuan sebelum tahun 2018 lebih bagus dibandingkan laki-laki, namun tahun 2019 menurun 0,2 dibandingkan angka yang diperoleh laki-laki. Prediksi HLS perempuan masih berada dibawah laki-laki.

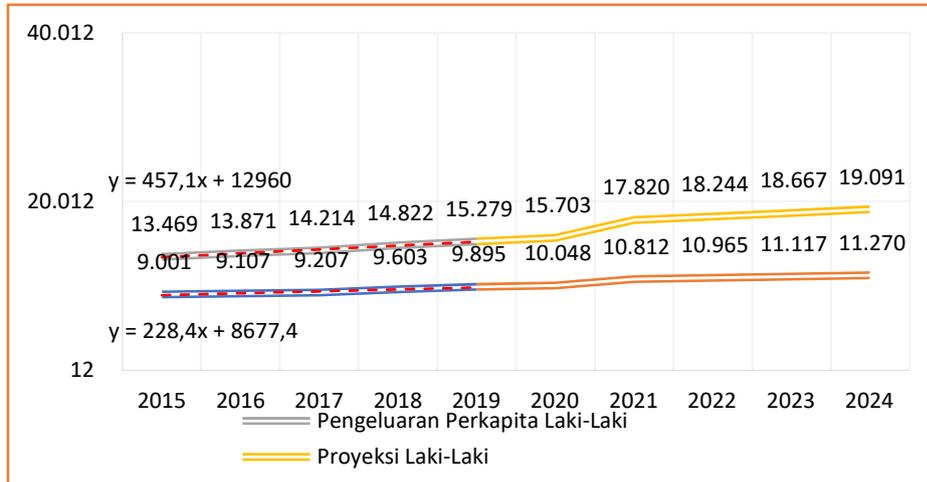
Kesenjangan gender yang terjadi adalah aksesibilitas perempuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pilihan bekerja pada perempuan khususnya di pedesaan tidak dapat dipungkiri memberikan kontribusi bagi peningkatan HLS. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri pada 5 tahun yang akan datang posisi HLS laki-laki sama diangka 13, namun selisih 0,54.

### b. Proyeksi Pengeluaran Perkapita

Melihat perkembangan Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu laki-laki ( $y = 457,1x + 12.960$ ) dan perempuan ( $y = 228,4x + 8.677,4$ ) sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu laki-laki (15.703 ribu rupiah) dan perempuan (10.048 ribu rupiah). Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu laki-laki ( $y = 423,6x + 14.855$ ) dan perempuan ( $y = 152,8x + 9.742,2$ )

sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7, laki-laki = 17.820 ribu rupiah dan perempuan = 10.812 ribu rupiah).

Tahun 2022 (hasil peramalan ke 8, laki-laki = 18.244 ribu rupiah dan perempuan = 10.965 ribu rupiah), pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9, laki-laki = 18.667 ribu rupiah dan perempuan = 11.117 ribu rupiah), pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10, laki-laki = 19.091 ribu rupiah dan perempuan = 11.270 ribu rupiah), seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.15** Proyeksi Kontribusi Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

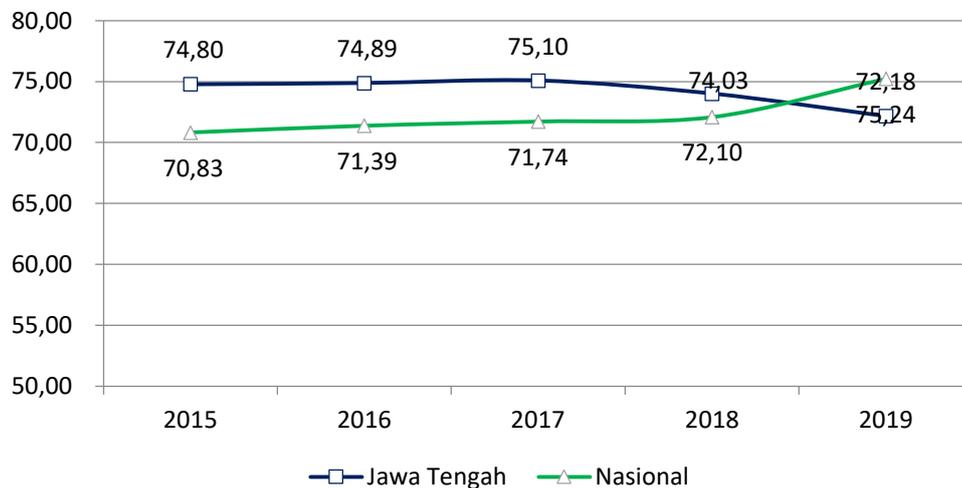
## B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

BPS mendefinisikan bahwa IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Untuk itu metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 74,80, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 75,10, kemudian mengalami penurunan pada 2018 menjadi sebesar 74,03, dan pada 2019 turun menjadi 72,18. Kondisi tersebut tidak relevan dengan IDG Nasional yang sama-sama mengalami fluktuasi, namun berbeda dengan kondisi Nasional yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

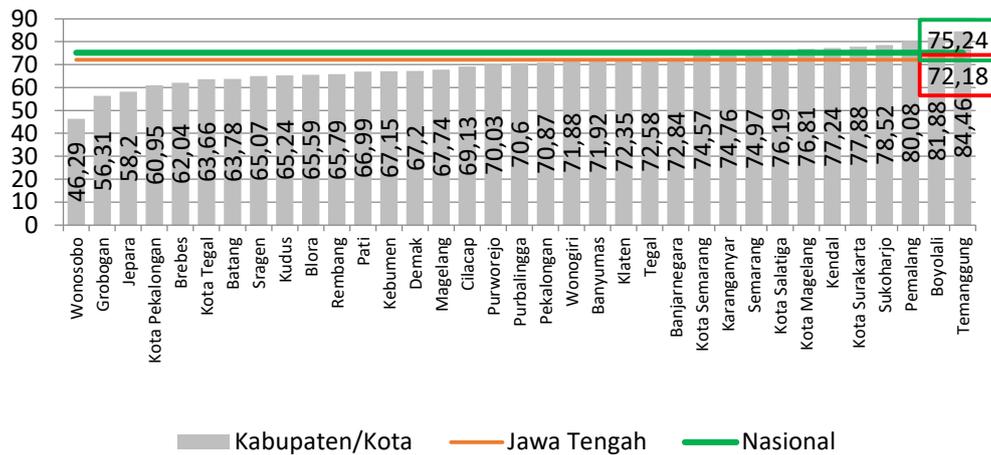


Sumber: BPS 2020

**Gambar 3.16 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

Indeks Pembangunan Gender (IDG) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melampaui capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional hanya sebanyak 8 Kabupaten/Kota, sedangkan sebagian besar Kabupaten/Kota lainnya belum mencapai capaian Provinsi dan Nasional. Di antara seluruh Kabupaten/Kota, IDG terendah di bawah Provinsi Jawa Tengah (72,18) dan Nasional (75,24) berada di 21 kabupaten/kota, yaitu Wonosobo, Grobogan, Jepara, Kota Pekalongan, Brebes, Kota Tegal, Batang, Sragen, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Kebumen, Demak, Magelang, Cilacap, Purworejo, Purbalingga, Pekalongan, Wonogiri, dan Banyumas.

Kabupaten Wonosobo, Grobogan, dan Jepara bahkan hanya bernilai dibawah 60, sementara Kota Pekalongan, Brebes, Kota Tegal, Batang, Sragen, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Kebumen, Demak, Magelang, Cilacap, Purworejo, Purbalingga, Pekalongan, Wonogiri, dan Banyumas sudah mencapai dibawah 72,18. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



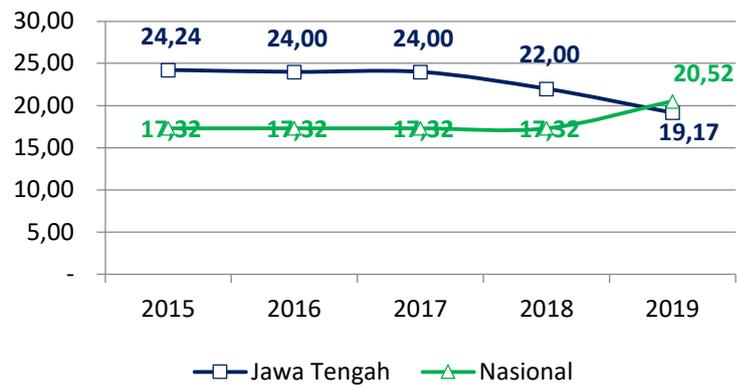
Sumber: BPS, 2020

**Gambar 3.17 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019**

Gambaran indikator pembentuk IDG provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

**1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen**

Peningkatan kualitas perempuan di provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Keterlibatan Perempuan di Parlemen menurun pada tahun terakhir setelah mengalami



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 3.18 Perkembangan Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

peningkatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 24,24%. Angka tersebut sedikit menurun pada tahun 2016 dan 2017, yaitu sebesar 24,00%, kemudian menurun selama 2 tahun terakhir, hingga menjadi sebesar 19,17% tahun 2019. Kondisi tersebut berbeda dengan kondisi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Nasional yang mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2015 hingga 2018, dan kemudian meningkat pada 2019, menjadi sebesar 20,52.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melampaui capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional hanya sebanyak 12 Kabupaten/Kota. Di antara seluruh Kabupaten/Kota, IDG dengan capaian di bawah Provinsi Jawa Tengah (19,17) dan Nasional (20,52) berada di 18 kabupaten/kota, yaitu Wonosobo, Kudus, Sragen, Kota Pekalongan, Magelang, Grobogan, Demak, Blora, Rembang, Kota Tegal, Jepara, Batang, Wonogiri, Pati, Brebes, Purworejo, Klaten, dan Semarang.

Merunut dari Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, target capaian perolehan wakil perempuan di parlemen seharusnya dapat dicapai sebesar 30%. Upaya ini sebenarnya sudah mulai sejak Undang-undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Reformasi pertama adalah sistem daftar terbuka, di mana pemilih boleh memilih partai dan calon legislatif (caleg). Caleg yang mendapatkan suara terbanyak berhak meraih kursi meskipun nomor urutnya bukan yang teratas (Parawansa, 2005)<sup>2</sup>. Reformasi sistem pemilihan umum juga membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak di parlemen dengan aturan yang menyebutkan minimal 30 persen perempuan didalam daftar bahwa partai politik wajib menempatkan calon legislatif (UNDP, 2013)<sup>3</sup>. Konsep kuota memang telah menjadi salah satu strategi negara-negara di dunia dalam upaya mereka melibatkan lebih banyak perempuan ke dalam politik parlemen (Krook, 2009)<sup>4</sup>.

Ada tiga alasan rendahnya angka partisipasi perempuan: hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik (Lovenduski, Campbell, & Sampson-Jacent, 2002). Kendala struktural memiliki peran yang sangat sentral dalam komposisi gender di politik (Reynolds, 1999), sebab pembangunan sosio-ekonomi berjalan seiring dengan keterwakilan perempuan di parlemen, sebagaimana tercermin dalam laporan PBB terkait dengan progres kesetaraan gender di sektor ekonomi, pendidikan, harapan hidup, dan kesehatan (Norris & Inglehart, 2001).

Stereotipe berbasis gender dan budaya ini banyak terjadi di dalam manajemen partai politik yang ditandai dengan gaya kepemimpinan maskulin yang menghambat keterwakilan politik yang setara. Secara sosial karakteristik pemimpin partai politik yang dianut oleh masyarakat adalah tegas, rasional, dominan, berwibawa, yang semua ini dianggap hanya melekat pada laki-laki. Stereotipe gender juga melekat pada distribusi portofolio

---

<sup>2</sup> Parawansa, K. I. (2005) Enhancing Women's Political Participation in Indonesia. In J. Ballington, & A. Karam, *Women in Parliament: Beyond Numbers* (pp. 82- 90). Stockholm: IDEA.

<sup>3</sup> UNDP. (2013). *Human Development Report 2013 - The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*. [Online], available from: UNDP.org: <<http://hdr.undp.org/en/2013-report>> [Accessed on 19 April 2014].

<sup>4</sup> Krook, M. L. (2009) *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford: Oxford University Press.

tatanan dalam partai politik, maupun anggota legislatif. Dalam struktur di parlemen, perempuan jarang menduduki jabatan strategis. Pintu parlemen tertutup bagi perempuan. Peranan partai politik yang dominan menentukan peluang perempuan dalam berpartisipasi. Untuk menentukan posisi perempuan di parlemen, tangan partai politiklah yang bermain (Indra K,2019)<sup>5</sup>.

Berkaitan peran-peran di legislatif ketimpangan gender bermula dari jumlah yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan yang tidak pernah mencapai 30 % dari total jumlah parlemen, berakibat lemahnya posisi tawar-menawar pihak perempuan terhadap laki-laki. Konstruksi sosial yang dibawa dalam ranah domestik tidak mampu mengurangi peran-peran dalam ranah publik. Meskipun perempuan menguasai sektor domestik, namun pada akhirnya perempuan dengan sadar membawa identitas domestik dalam ranah publik. Perempuan memiliki kuasa penuh terhadap ruang domestik, sementara laki-laki menguasai sektor publik<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Indra Kertati, Kontribusi Keterwakilan Perempuan di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (IDG) , Jurnal Transparansi 62 E-Issn 2622-0253 Vol. 2 ,No. 1, Juni 2019, Pp. 62-72

<sup>6</sup> Ibid

*Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam  
Kongres Perempuan Jawa Tengah I:*



Diskusi Komunitas **“Perempuan** now/Media Gathering | Seminar  
November 2019

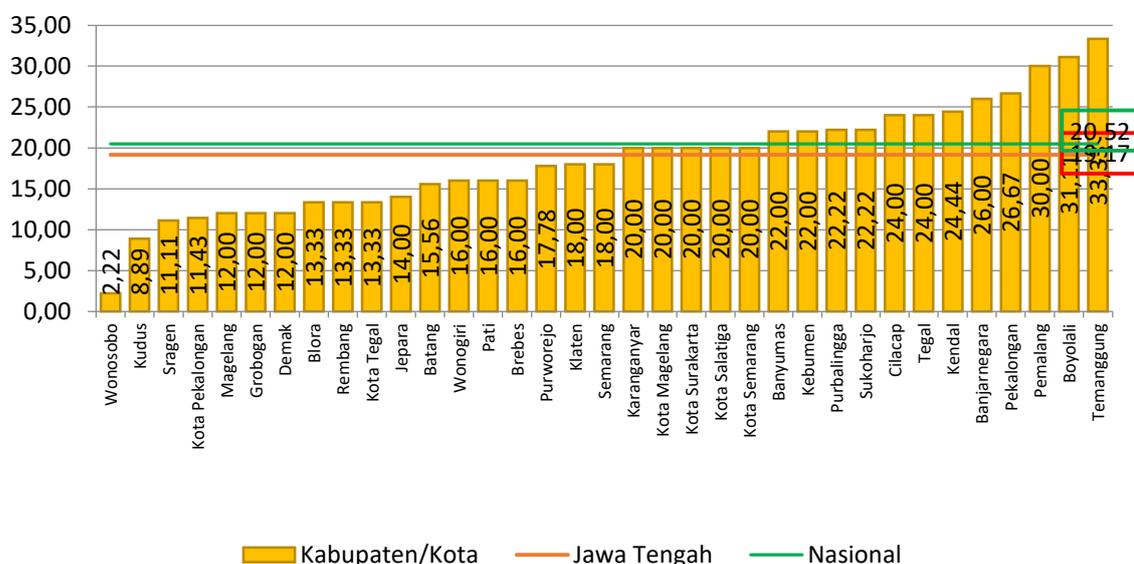
Sumber Foto:  
<https://jateng.tribunnews.com/2019/12/01/dprd-jateng-minta-perempuan-berperan-kurangi-angka-kemiskinan?page=all>

# **Perempuan Berdaya Jawa Tengah Maju”**

Ketidampungan perempuan dalam pengambilan keputusan yang merembes dari kegiatan sektor domestik ke sektor publik menjadikan keputusan yang diambil gamang<sup>7</sup>. Perempuan terlampaui lama terkuali dalam urusan domestik meskipun mereka berlatar belakang pendidikan tinggi yang baik. Meskipun beberapa perempuan telah melangkah di parlemen, namun stereotype bahwa perempuan adalah pengatur keluarga melebur dan terbawa dalam tatanan public dimana dia berada. Kehadiran perempuan di parlemen hanya memberikan tempat, tanpa kesempatan untuk mengambil keputusan<sup>8</sup>.

Selain kesenjangan dalam pengelolaan keluarga, persoalan lain yang turut mempengaruhi adalah sistem rekrutmen kader di partai politik yang belum sempurna. Banyak partai politik memilih kader dengan pengabaian atas jenis kelamin. Kader lebih banyak ditentukan oleh kekerabatan, sehingga potensi-potensi perempuan tertutup dan tidak menghiasi kepengurusan partai politik. Selain itu ongkos politik yang mahal, kualitas SDM yang rendah serta karya-karya anggota legislatif perempuan yang tidak terpublikasi secara luas, jabatan di legislatif yang lebih banyak dipercayakan kepada laki-laki, adalah warna-warni kesenjangan gender dalam politik di legislatif<sup>9</sup>.

Quota 30 % perempuan di legislatif sangat diperlukan untuk dapat mengubah agenda politik, namun untuk meloloskan kebijakan yang ramah perempuan, butuh 40% anggota legislatif yang pro terhadap kebijakan responsive gender (Gray, 2006)<sup>1</sup>. Kebijakan pro gender masih terwujud jika jumlah perempuan di legislative hanya di bawah 20%. Jika jumlah anggota legislative di Kabupaten Kota berjumlah 50 orang, maka hanya terdapat 10 orang perempuan yang harus berjuang mempertahankan kemampuan dan bersaing dengan 40 laki-laki. Jika hanya 2% maka sesungguhnya hanya ada 1 anggota legislative perempuan. Perjuangan 1 orang perempuan melawan 49 orang laki-laki tentu bukan persoalan yang mudah.



Sumber: Diolah dari data BPS,2020

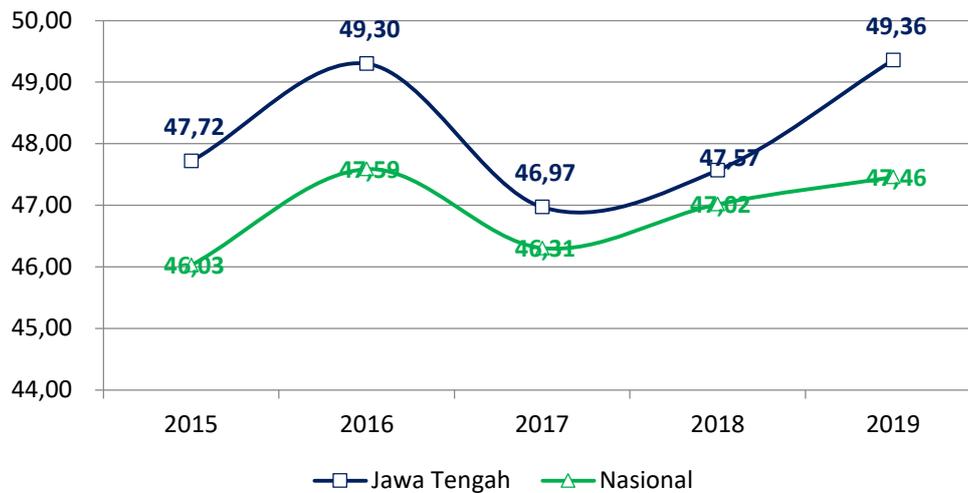
**Gambar 3.19** Posisi Relatif Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

<sup>7</sup> Sullivan, N, 1991. "Gender and Politics in Indonesia". Dalam Maila Stivens. Why Gender Matters in Southeast Asian Politics. Australia: Aristoc Press.

<sup>8</sup> Indra Kertati, op cit

<sup>9</sup> Indra Kertati,op cit

## 2. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi



Sumber: Diolah dari data BPS 2016-2020

**Gambar 3.20** Perkembangan Indikator Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

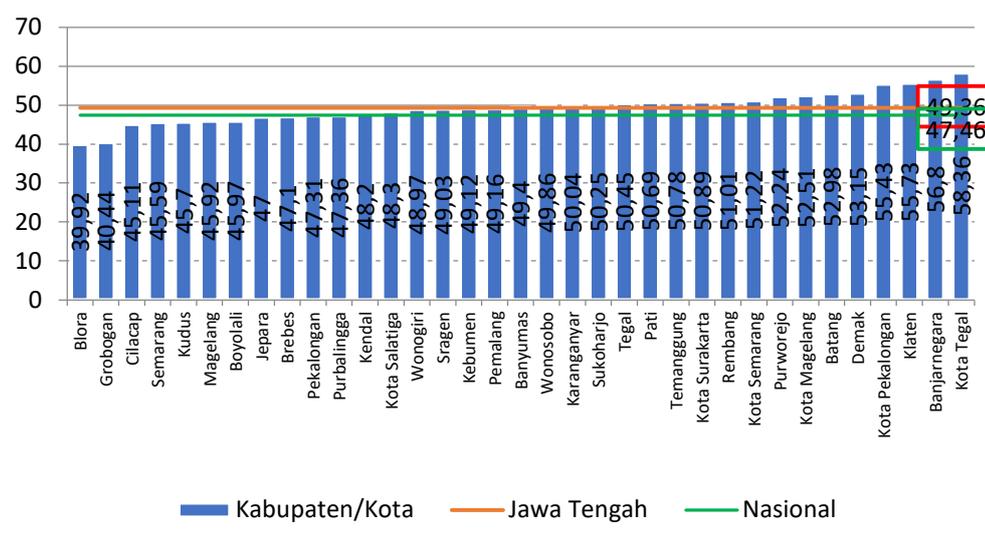
Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 47,72% meningkat menjadi sebesar 49,30% pada 2016, dan turun menjadi 46,97% pada tahun 2017, dan naik 2 tahun berturut-turut hingga menjadi 49,36% pada 2019. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Nasional yang mengalami hal serupa.

Lonjakan atas indikator ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 48,83 % perempuan di perkotaan telah mencapai pendidikan SMA keatas, sementara di pedesaan baru mencapai 23,93 %. Capaian ini telah merubah posisi perempuan penganggur menjadi bekerja, karyawan menjadi pekerja profesional. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dalam pengambilan keputusan<sup>10</sup>. Beberapa hal dapat memperkuat peningkatan indikator ini adaah meningkatnya jumlah PNS perempuan serta jumlah PNS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Terdapat 31,13% perempuan yang telah mampu berada di eselon tiga dan dua.

<sup>10</sup> <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2>

Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melampaui capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebanyak 18 Kabupaten/Kota. Di antara seluruh Kabupaten/Kota, Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dengan capaian di bawah Provinsi Jawa Tengah (49,36%) dan Nasional (47,46%) berada di 11 kabupaten/kota, yaitu Blora, Grobogan, Cilacap, Semarang, Kudus, Magelang, Boyolali, Jepara, Brebes, Pekalongan, Dan Purbalingga. Menilik data yang ada posisi capaian indikator ini cukup bagus, hanya Kabupaten Blora yang masih berada dibawah angka 40%.

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Diolah dari data BPS 2020

**Gambar 3.21** Posisi Relatif Indikator Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

### 3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

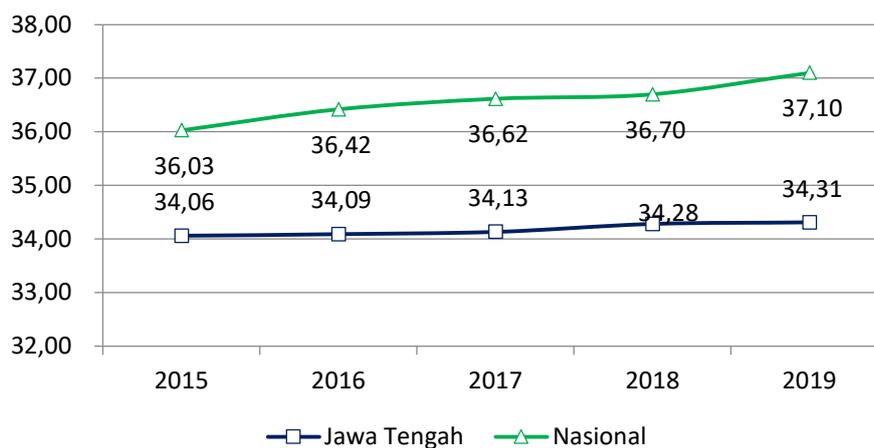
Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Corley, Perardel, dan Popova (2005) menyebutkan bahwa kesenjangan upah di beberapa sektor di negara-negara Asia bahkan mencapai 40 persen. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada meunculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2019.pdf>

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. European Commission (2005) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Mussida dan Picchio (2013) menjelaskan bahwa penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan<sup>12</sup>.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan. KPPPA menunjukkan di sector formal, laki-laki menempatkan 65,78 % dan perempuan 34,22%. Pada sektor informal laki-laki sebanyak 57,96% dan perempuan 42,04%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor informal lebih banyak dibanding di sektor formal. Pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebesar 36,03% naik menjadi sebesar 37,10% pada tahun 2019. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional yang mengalami peningkatan.



Sumber: Diolah dari Data BPS, 2016-2020

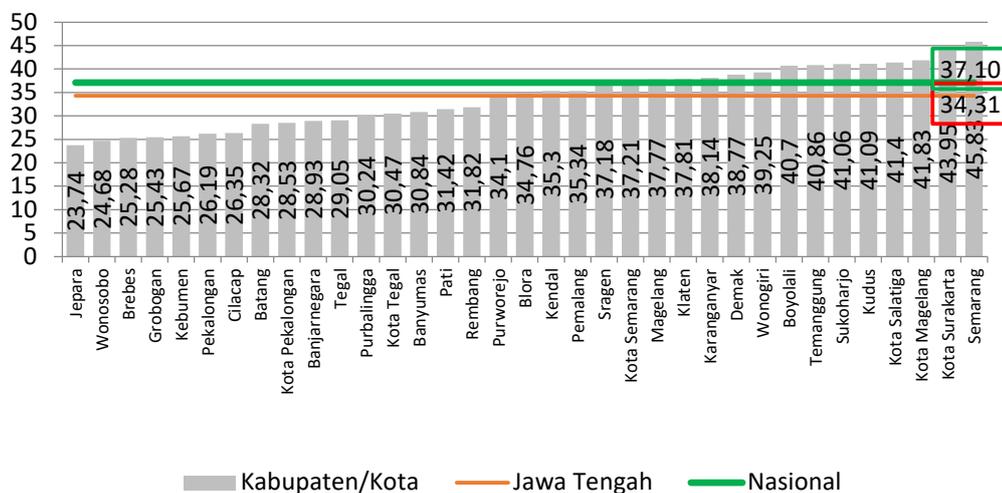
**Gambar 3.22 Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

Pekerja perempuan di sektor informal juga berpenghasilan lebih rendah (ILO, 2018). Menurut UN Women (2015), banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja

<sup>12</sup> Ibid hal-62

tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual. Meskipun jumlah perempuan bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan sektor formal, namun hal lain yang menghambat adalah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jenis usaha yang digeluti juga lebih ke arah pekerjaan domestik.

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melampaui capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional hanya sebanyak 15 Kabupaten/Kota. Di antara seluruh Kabupaten/Kota, Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dengan capaian di bawah Provinsi Jawa Tengah (19,17%) dan Nasional (20,52%) berada di 17 kabupaten/kota, yaitu Jepara, Wonosobo, Brebes, Grobogan, Kebumen, Pekalongan, Cilacap, Batang, Kota Pekalongan, Banjarnegara, Tegal, Purbalingga, Kota Tegal, Banyumas, Pati, Rembang, Purworejo, Blora, Kendal, Pemalang, Sragen, Kota Semarang, Magelang, Klaten, Karanganyar, Demak, Wonogiri, Boyolali, Temanggung, Sukoharjo, Kudus, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Semarang.



Sumber: Diolah dari data BPS, 2020

**Gambar 3.23** Posisi Relatif Indikator Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

**Pertanyaan yang sering muncul dalam berbagai seminar maupun debat yaitu mengapa banyak perempuan bekerja namun kontribusinya rendah dalam menopang kehidupan rumah tangga. Rata-rata kontribusi perempuan hanya berkisar 23-30%.**

*Terdapat beberapa asumsi atas data tersebut yaitu pendapatan perempuan memang masih kecil walaupun partisipasi dalam bekerja cukup tinggi. Perempuan menganggur dan hanya bekerja tanpa upah, atau bekerja pada industri rumahan yang hasilnya terbatas.*

*Perempuan memenuhi beberapa ruang terbuka perdagangan seperti pasar, UMKM, namun pergerakan mereka belum signifikan terhadap pendapatan yang dimiliki. Domestifikasi yang di emban, mengurangi kesempatan untuk bekerja di ranah publik, beban ganda mengharuskan perempuan mengurus rumah tangga yang belum tentu dapat dibagi dengan anggota keluarga lain. Kontribusi yang rendah oleh perempuan membawa konsekuensi jika terjadi pada perempuan dengan status Kepala Keluarga dan dalam kondisi miskin. Keterbatasan aksesibilitas dalam memperoleh sumberdaya akan menjadi kendala besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga.*



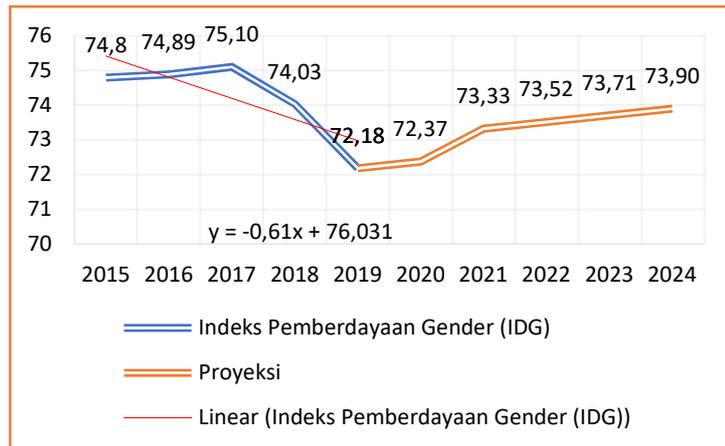
Sumber Foto: <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/05/22/138321/pt-djarum-bagikan-rp-958-miliar-untuk-thr-karyawan>

#### 4. Proyeksi IDG

Melihat perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu  $y = -0,61x + 76,031$  sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 72,37. Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 0,191x + 71,989$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 73,33, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 73,52,

pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 73,71, pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 73,90.

IDG Jawa Tengah pernah berada diatas yaitu pada tahun 2017, lalu mulai melandai hingga tahun 2019. IDG Jawa Tengah lima tahun yang akan datang akan meningkat meskipun tidak terlampau tinggi dan masih belum di posisi yang sama seperti tahun 2017.



Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

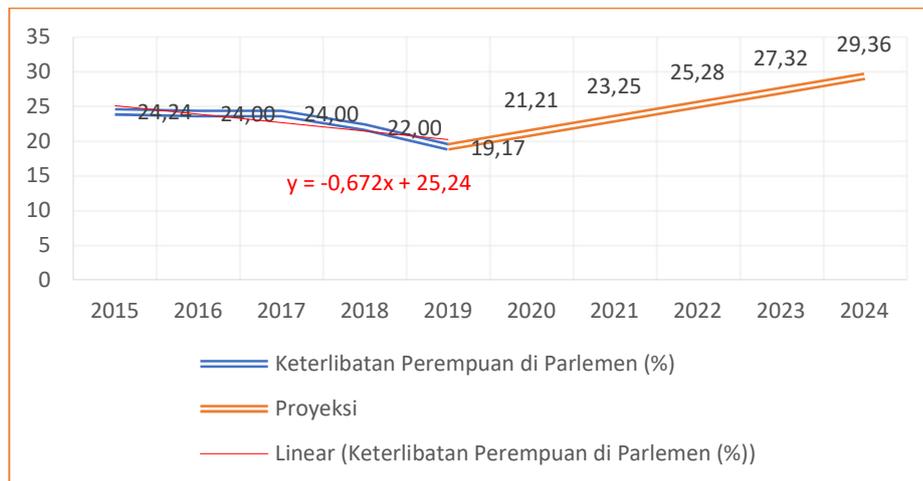
**Gambar 3.24** Proyeksi IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Kondisi ini akan berbeda jika Pemilu tahun 2024 perempuan mampu merebut kursi di DPRD sebagaimana kuota 30% yang ditetapkan. Posisi perempuan di legislatif memang posisi yang paling aman dalam kurun waktu lima tahun, karena siklus pemilu lima tahun menentukan besaran capaian IDG. Jika dalam Pemilu Legislatif perempuan dapat memenuhi kuota 30%, maka posisi IDG akan stabil selama 5 tahun.

Untuk mengetahui proyeksi IDG masing-masing komponen pembentuk IDG.

#### a. Proyeksi Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)

Melihat perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu  $y = -0,672x + 25,24$  sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,21%. Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 2,038x + 17,132$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 23,25%, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 25,28%, pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 27,23%, pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 29,36%. Namun peramalan ke 6 dan ke 9 tidak mungkin terjadi dan stagnan pada angka 19,17%, sehingga lebih kepada upaya mendorong minat perempuan untuk mengikuti kompetisi sebagai calon legislatif pada pilkada serentak tahun 2024 untuk mencapai peramalan ke 10, seperti terlihat pada Gambar berikut.

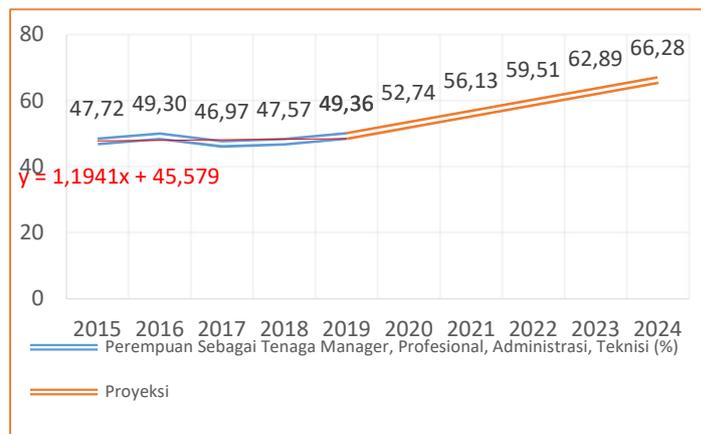


Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.25** Proyeksi Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

**b. Proyeksi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)**

Melihat perkembangan Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu  $y = 1,1941x + 45,579$  sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 52,74%. Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 3,3836x + 45,976$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 56,13%, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 59,51%, pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 62,89%, pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 66,28%.



Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.26** Proyeksi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

### c. Proyeksi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)

Melihat perkembangan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja di Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga tahun 2019 diperoleh fungsi linier, yaitu  $y = 0,069x + 33,968$  sehingga diprediksikan (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 34,30%. Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi linier pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 0,09x + 34,22$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 34,49%, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 34,58%, pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 34,67%, pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 34,76%, seperti terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: Olahan data dari BPS, 2016-2020

**Gambar 3.27**      **Proyeksi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. IPG Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yaitu dari sebesar 92,21 pada 2015, naik menjadi sebesar 92,22 pada tahun 2016, kemudian turun menjadi 91,94, lalu sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2018, menjadi sebesar 91,95, dan terakhir pada 2019 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 91,89.
2. Kabupaten/Kota, IPG terendah di bawah IPG Provinsi Jawa Tengah (91,89) dan IPG Nasional (91,07) berada di 10 kabupaten/kota, yaitu Blora, Pematang, Grobogan, Brebes, Cilacap, Tegal, Rembang, Banyumas, Demak, Jepara, Batang, Sragen, Wonogiri, dan Pati.
3. Prediksikan IPG (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 91,90. Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi liner pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 0,008x + 92,054$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 91,94, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 91,95, pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 91,95 (stagnan), pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 91,96
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 sebesar 74,80, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 75,10, kemudian mengalami penurunan pada 2018 menjadi sebesar 74,03, dan pada 2019 turun menjadi 72,18.
5. Indeks Pembangunan Gender (IDG) pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah melampaui capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional hanya sebanyak 8 Kabupaten/Kota, sedangkan sebagian besar Kabupaten/Kota lainnya belum mencapai capaian Provinsi dan Nasional. Di antara seluruh Kabupaten/Kota, IDG terendah di bawah Provinsi Jawa Tengah (72,18) dan Nasional (75,24) berada di 21 kabupaten/kota, yaitu Wonosobo, Grobogan, Jepara, Kota Pekalongan, Brebes, Kota Tegal, Batang, Sragen, Kudus, Blora, Rembang, Pati,

Kebumen, Demak, Magelang, Cilacap, Purworejo, Purbalingga, Pekalongan, Wonogiri, dan Banyumas.

6. Prediksi IDG (hasil peramalan ke 6) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 72,37. Dalam memprediksi peramalan ke 7 hingga 10 diperoleh fungsi liner pada kinerja positif tahun 2019-Proyeksi 2020, yaitu  $y = 0,191x + 71,989$  sehingga diprediksikan pada tahun 2021 (hasil peramalan ke 7) sebesar 73,33, pada tahun 2022 (hasil peramalan ke 8) sebesar 73,52, pada tahun 2023 (hasil peramalan ke 9) sebesar 73,71, pada tahun 2024 (hasil peramalan ke 10) sebesar 73,90.

## B. Rekomendasi

IPG dan IDG harus diafirmasi untuk mencapai angka ideal. Pencapaian angka ideal ini akan mencerminkan kesejahteraan dan relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu beberapa strategi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. Strategi Peningkatan IPG

- a. Meningkatkan aksesibilitas perempuan dalam sumberdaya ekonomi, baik melalui bantuan langsung ataupun bantuan teknis bagi usaha-usaha perempuan.
- b. Peningkatan kapasitas perempuan dalam mengembangkan usaha baru berbasis teknologi informasi.
- c. Memetakan kondisi dan posisi perempuan rentan agar dapat diketahui dan dicarikan alternative pemecahannya. Kondisi dan posisi perempuan rentan ini akan menjadi bahan dalam melakukan tindakan afirmatif dan dilakukan oleh semua OPD.
- d. Kajian Pemetaan perempuan usia 25 tahun keatas yang tidak mengenyam pendidikan dasar.
- e. Kajian pemetaan terhadap perempuan KK yang tidak memiliki identitas hukum ;
- f. Pendampingan KKP dalam mendapatkan identitas hukum;
- g. Bantuan teknis untuk meningkatkan pendapatan KKP maupun kelompok rentan.

## 2. Strategi Peningkatan IDG

- a. Menguatkan kebijakan Quota 30%, melalui : (1) advokasi kepada partai politik agar secara internal melakukan afirmasi kebijakan politik yang pro gender dan hanya sekedar formalitas, namun dilaksanakan sepenuh hati, (2) mengadvokasi perempuan yang berpendidikan tinggi untuk berani mengambil kesempatan menjadi anggota partai politik dan bersaing dalam kontestasi pemilu; dan (3) kepada masyarakat untuk memberikan ruang bagi perempuan sebagai anggota legislatif.
- b. Meningkatkan kapasitas perempuan khususnya kader partai politik untuk membuktikan kapasitas diri mampu dan layak sebagai anggota DPRD.
- c. Mendorong Perguruan Tinggi, LSM dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan kapasitas anggota DPRD perempuan agar memiliki kapasitas bernegosiasi, penguasaan teknologi informasi dan publikasi atas kinerja selama menjadi anggota DPRD.
- d. Memastikan kepada partai politik bahwa ongkos dan keamanan politik terjamin bagi calon anggota legislatif perempuan.
- e. Membuka akses untuk bersaing kompetitif dalam memegang jabatan public
- f. Meningkatkan kapasitas individu khususnya dalam hal berkomunikasi, berkoordinasi dan menulis.
- g. Menguatkan “mental ideal” dalam berfikir dan bertindak bagi perempuan pekerja.
- h. Peningkatan ketrampilan, negosiasi, berjejaring berorganisasi, dan pengambilan keputusan bagi perempuan yang bekerja di sektor formal untuk meraih prestasi dengan kinerja optimum.
- i. Penguatan kapasitas perempuan pekerja informal untuk menaikkan posisi tawar dan upah yang layak, serta meningkatkan kapasitas serta daya lenting untuk meraih prestasi yang makin baik.
- j. Membuka peluang bisnis berbasis IT dengan focus pada perempuan rentan, miskin dan KRT agar bangkit dan berkembang
- k. Memfasilitasi usaha-usaha yang digeluti perempuan yang mampu berbadan hukum dan sehingga memiliki posisi tawar yang semakin baik.
- l. Medesain ketrampilan bagi perempuan yang lebih inovatif dan kompetitif di pasar bebas.

# DAFTAR PUSTAKA

Grey, S. (2006). "Numbers And Beyond: The Relevance Of Critical Mass In Gender Research." *Politics & Gender*, 2: 491-530.

Indra Kertati, Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg) , *Jurnal Transparansi* 62 E-Issn 2622-0253 Vol. 2 ,No. 1, Juni 2019, Pp. 62-72

Krook, M. L., 2009 *Quotas For Women In Politics: Gender And Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford: Oxford University Press.

Parawansa, K. I. (2005) *Enhancing Women's Political Participation In Indonesia*. In J. Ballington, & A. Karam, *Women In Parliament: Beyond Numbers* (Pp. 82- 90). Stockholm: Idea.

Sullivan, N, 1991. "Gender And Politics In Indonesia". Dalam Maila Stivens. *Why Gender Matters In Southeast Asian Politics*. Australia: Aristoc Press.

UNDP. 2013. *Human Development Report 2013 - The Rise Of The South: Human Progress In A Diverse World*. [Online], Available From: [Undp.Org: <Http://Hdr.Undp.Org/En/2013-Report>](http://hdr.undp.org/en/2013-report) [Accessed On 19 April 2014].

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2019.pdf>

Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2020.

Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-BPS, 2019  
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2019.pdf>

Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-BPS, 2018  
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2018.pdf>

Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-BPS, 2017  
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2017.pdf>

Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-BPS, 2016  
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2016.pdf>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3p5q32YXuAhUT63MBHS7PDYYQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bps.go.id%2Fsubject%2F40%2Fgender.html&usg=AOvVaw36UX8S1JJtf02u8eqhOr3->

Bappeda Provinsi Jawa, 2020. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Semarang.

**P**uji syukur alhamdulillah, penyusunan buku Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah telah selesai disusun. Buku ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah serta capaian Kabupaten/Kota. Memperhatikan perkembangan IPG dan IDG akan memberikan motivasi dan kekuatan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, mengingat indikator IPG dan IDG menggambarkan status dan kondisi ketimpangan gender yang ada.

Menurunnya IPG dan IDG disebabkan banyak hal diantaranya factor budaya yang masih membelenggu kehidupan perempuan sehingga aksesibilitas perempuan menggapai sumberdaya yang ada tidak dapat berkembang. Faktor budaya di masyarakat memang tidak mudah dilangkan begitu saja, halini terkait dengan konstruksi yang telah terbentuk bertahun-tahun. Perspektif gender dalam masyarakat masih dianggap sebagai perspektif stereotipe, dan gender masih dianggap sebagai kepentingan perempuan.

Tantangan lain adalah belum optimalnya peran-peran actor kunci baik di lingkungan pemerintahan, dan stakeholder dalam mendorong pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mendorong, mempercepat pencapaian IPG dan IDG melalui berbagai program dan kegiatan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat melakukan sendiri. Dukungan masyarakat menjadi salah satu yang penting untuk mewujudkan impian ini semua.

Menghadapi pandemik Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari akan terjadi penurunan capaian IPG dan IDG. Upaya memutus rantai penyebaran, melakukan intervensi ekonomi masyarakat, dan mendorong agar keluarga, tetap aman, dan kondisi ekonomi rumah tangga pulih sudah banyak dilakukan, namun covid-19 memang bukan pandemi biasa. Covid-19 benar-benar merupakan penyakit menular yang dasyat dan penyebarannya bisa dari banyak arah.

Semoga hasil analisis atas IPG dan IDG ini dapat berguna baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Semoga Allah senantiasa menguatkan, menjaga dan melindungi pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi pandemi covid-19.



ISBN 978-602-6737-29-8

